



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

KLASIFIKASI ARSIP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa Klasifikasi Arsip merupakan pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 2 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip dijelaskan Pembuatan dan Penerimaan Arsip dibuat berdasarkan Klasifikasi Arsip;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.

2. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
4. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Pemerintah Daerah.
5. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
6. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip yang dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
7. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

Pasal 2

Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah merupakan acuan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan arsip dinamis.

BAB II KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 3

- (1) Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan kode arsip dalam bentuk angka.
- (2) Kode klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanda pengenal urusan dan fungsi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah sebagai dasar pemberkasan dan penataan arsip.

Pasal 4

- (1) Jenis klasifikasi arsip dan kode klasifikasi arsip, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), meliputi :

000	Umum
000.1	Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan
000.2	Perlengkapan
000.3	Pengadaan
000.4	Perpustakaan
000.5	Kearsipan
000.6	Persandian
000.7	Perencanaan Pembangunan
000.8	Organisasi dan Tata Laksana
000.9	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan
100	Pemerintahan
100.1	Otonomi Daerah
100.2	Pemerintahan Umum
100.3	Hukum
200	Politik
200.1	Kesatuan Bangsa dan Politik
200.2	Pemilu

300	Keamanan dan Ketertiban
300.1	Satuan Polisi Pamong Praja
300.2	Penanggulangan Bencana, Pencarian dan Pertolongan
400	Kesejahteraan Rakyat
400.1	Pembangunan Daerah Tertinggal
400.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
400.3	Pendidikan
400.4	Keolahragaan
400.5	Kepemudaan
400.6	Kebudayaan
400.7	Kesehatan
400.8	Agama dan Kepercayaan
400.9	Sosial
400.10	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
400.11	Pertamanan dan Pemakaman
400.12	Kependudukan dan Catatan Sipil
400.13	Keluarga Berencana
400.14	Hubungan Masyarakat
500	Perekonomian
500.1	Ketahanan Pangan
500.2	Perdagangan
500.3	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
500.4	Kehutanan
500.5	Kelautan dan Perikanan
500.6	Pertanian
500.7	Peternakan
500.8	Perkebunan
500.9	Perindustrian
500.10	Energi dan Sumber Daya Mineral
500.11	Perhubungan
500.12	Komunikasi dan Informatika
500.13	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
500.14	Statistik
500.15	Ketenagakerjaan
500.16	Penanaman Modal
500.17	Pertanahan
500.18	Transmigrasi
600	Pekerjaan Umum dan Ketenagaan
600.1	Pekerjaan Umum
600.2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
600.3	Tata Ruang (Tata Kota)
600.4	Lingkungan Hidup
700	Pengawasan
700.1	Pengawasan Internal
800	Kepegawaian
800.1	Sumber Daya Manusia
800.2	Pendidikan dan Pelatihan
900	Keuangan
900.1	Keuangan Daerah

(2) Ketentuan mengenai kode klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 41 Tahun 2015 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 28 September 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 29 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

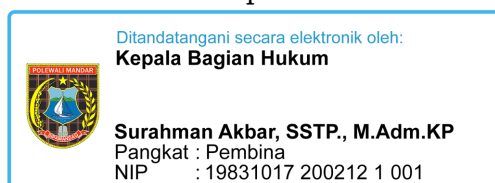
ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022 NOMOR 36.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 29 September 2022



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KLASIFIKASI ARSIP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
000 UMUM				
000.1	KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN			
	000.1.1	Telekomunikasi		
	000.1.2	Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
		000.1.2.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah	
		000.1.2.2	Perjalanan Dinas DPRD	
		000.1.2.3	Perjalanan Dinas Pegawai	
	000.1.3	Perjalanan Dinas Luar Negeri		
		000.1.3.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah	
		000.1.3.2	Perjalanan Dinas DPRD	
		000.1.3.3	Perjalanan Dinas Pegawai	
	000.1.4	Penggunaan Fasilitas Kantor (antara lain: Permintaan dan Penggunaan Ruang Rapat, Gedung, Kendaraan, Wisma, Rumah Dinas dan Fasilitas Kantor Lainnya)		
	000.1.5	Rapat pimpinan (antara lain: Notula/Risalah Rapat)		
	000.1.6	Penyediaan Konsumsi		
	000.1.7	Pengurusan Kendaraan Dinas		
		000.1.7.1	Pengurusan surat-surat kendaraan dinas	
		000.1.7.2	Pemeliharaan dan perbaikan	
		000.1.7.3	Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan	
	000.1.8	Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor		
		000.1.8.1	Pertamanan/ Landscape	
		000.1.8.2	Penghijauan	
		000.1.8.3	Perbaikan Gedung	
		000.1.8.4	Perbaikan Peralatan Kantor	
		000.1.8.5	Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma	
		000.1.8.6	Kebersihan Gedung dan Taman	
	000.1.9	Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer		
		000.1.9.1	Perbaikan / Pemeliharaan	
		000.1.9.2	Pemasangan	
	000.1.10	Ketertiban dan Keamanan		
		000.1.10.1	Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawasan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas	
		000.1.10.2	Laporan Ketertiban dan Keamanan	
	000.1.11	Administrasi Pengelolaan Parkir		
	000.1.12	Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya		
000.2	PERLENGKAPAN			
	000.2.1	Inventarisasi dan Penyimpanan		
		000.2.1.1	Data hasil inventarisasi dan penyimpanan	
		000.2.1.2	Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan	
	000.2.2	Pemeliharaan peralatan kantor		
		000.2.2.1	Data hasil pemeliharaan kantor	
		000.2.2.2	Laporan dan evaluasi pemeliharaan kantor	
	000.2.3	Distribusi		
		000.2.3.1	Barang habis pakai	
		000.2.3.2	Barang milik daerah	
	000.2.4	Penghapusan Barang Milik Daerah (antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD termasuk didalamnya proses lelang penghapusan)		
	000.2.5	Pengelolaan Database Barang Milik Daerah		
000.3	PENGADAAN			
	000.3.1	Rencana Pengadaan Barang dan Jasa (antara lain: Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan)		
	000.3.2	Pengadaan Langsung (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)		
	000.3.3	Pengadaan Tidak Langsung/Lelang (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)		
	000.3.4	Swakelola (antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi)		
	000.3.5	Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan (antara lain: Data base pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa, Data Base kontrak, Data Base Pengadaan Barang/jasa)		
	000.3.6	Monitoring dan Evaluasi (antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan hasil evaluasi)		
000.4	PERPUSTAKAAN			
	000.4.1	Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	000.4.2	Deposit Bahan Pustaka		
		000.4.2.1	Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	
		000.4.2.2	Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman	
		000.4.2.3	Terbitan Internasional dan Regional	

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
			000.4.2.4	Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
			000.4.2.5	Bibliografi dan Katalog
	000.4.3		Koleksi Pustaka	
		000.4.3.1	Pembelian	
		000.4.3.2	Hibah	
		000.4.3.3	Hadiah	
		000.4.3.4	Tukar Menukar	
		000.4.3.5	Implementasi Undang-Undang KCKR	
		000.4.3.6	Terbitan Internal	
		000.4.3.7	Pendistribusian bahan pustaka surplus	
		000.4.3.8	Inventarisasi koleksi (Buku Induk)	
	000.4.4		Pengolahan Bahan Pustaka	
	000.4.5		Pangkalan Data Katalog Koleksi	
	000.4.6		Layanan Perpustakaan	
		000.4.6.1	Keanggotaan	
		000.4.6.2	Peminjaman	
		000.4.6.3	Pengembangan gemar baca	
	000.4.7		Kerjasama Perpustakaan	
		000.4.7.1	MoU	
		000.4.7.2	Perjanjian kerjasama	
		000.4.7.3	Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional	
	000.4.8		Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan	
		000.4.8.1	Pengembangan situs web	
		000.4.8.2	Pengembangan kemas ulang informasi multimedia	
		000.4.8.3	Pengembangan program aplikasi perpustakaan	
		000.4.8.4	Pengembangan pangkalan data kepustakaan digital	
	000.4.9		Pangkalan Data Layanan Perpustakaan	
	000.4.10		Konservasi	
		000.4.10.1	Perawatan Bahan Perpustakaan	
		000.4.10.2	Perbaikan Bahan Perpustakaan	
		000.4.10.3	Penjilidan Bahan Perpustakaan	
	000.4.11		Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)	
	000.4.12		Transformasi Digital	
	000.4.13		Kurasi Digital	
	000.4.14		Pengembangan Perpustakaan	
		000.4.14.1	Perpustakaan Umum	
		000.4.14.2	Perpustakaan Khusus	
		000.4.14.3	Perpustakaan Sekolah	
		000.4.14.4	Perpustakaan Perguruan Tinggi	
	000.5		KEARSIPAN	
	000.5.1		Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	000.5.2		Pembinaan Kearsipan	
		000.5.2.1	Pengembangan Profesi Arsiparis (antara lain: Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis)	
		000.5.2.2	Bimbingan Konsultasi Arsiparis	
		000.5.2.3	Penilaian Arsiparis	
		000.5.2.4	Pemilihan Arsiparis Teladan (antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan)	
		000.5.2.5	Data Base Arsiparis	
		000.5.2.6	Bimbingan Konsultasi Kearsipan	
		000.5.2.7	Supervisi dan Evaluasi (antara lain: Perencanaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi)	
		000.5.2.8	Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi	
		000.5.2.9	Fasilitasi Kearsipan (antara lain: Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kearsipan)	
		000.5.2.10	Lembaga/Unit Kearsipan Teladan (antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan)	
		000.5.2.11	Jadwal Retensi Arsip (antara lain: Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI)	
	000.5.3		Pengelolaan Arsip Dinamis	
		000.5.3.1	Penciptaan (antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi)	
		000.5.3.2	Pemberkasan Arsip Aktif (antara lain: Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas)	
		000.5.3.3	Penataan Arsip Inaktif (antara lain: Daftar Arsip Inaktif, Daftar Arsip Inaktif Tematik)	
		000.5.3.4	Penggunaan (antara lain: Daftar Arsip Dinamis Berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Bukti Pemimjaman Arsip)	
		000.5.3.5	Autentikasi Arsip Dinamis (antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Dinamis)	
	000.5.4		Program Arsip Vital (antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital, dan Pemulihan Arsip Vital)	
	000.5.5		Pengelolaan Arsip Terjaga (antara lain: Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga)	
	000.5.6		Penyusutan Arsip	
		000.5.6.1	Pemindahan Arsip (antara lain:Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang dipindahkan)	
		000.5.6.2	Pemusnahan Arsip (antara lain: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk pemusanahan arsip dengan retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar arsip Yang Dimusnahkan)	

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
		000.5.6.3	Penyerahan Arsip Statis (antara lain: Pembentukan panitia penilai, Notulen rapat panitia, Surat pertimbangan panitia penilai, Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan digunakan dari pencipta arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang diserahkan)	
	000.5.7	Alih Media Arsip	(antara lain: Kebijakan alih media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang alih mediakan)	
	000.5.8	Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis		
		000.5.8.1	Data Base Pengelolaan Arsip Aktif	
		000.5.8.2	Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif	
	000.5.9	Pengelolaan Arsip Statis		
		000.5.9.1	Akuisisi (antara lain: Monitoring fisik dan daftar, Verifikasi terhadap daftar arsip , Menetapkan status arsip statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan arsip yang diserahkan Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar arsip yang diserahkan)	
		000.5.9.2	Penghargaan dan Imbalan	
		000.5.9.3	Sejarah Lisan (antara lain: Administrasi kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaset/CD/media lain sesuai perkembangan TI) dan Transkrip)	
		000.5.9.4	Daftar Pencarian Arsip Statis (antara lain: pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis)	
		000.5.9.5	Menyusun Sarana Bantu Temu Balik (antara lain: daftar arsip statis, inventaris arsip statis, guide	
		000.5.9.6	Preservasi Preventif (antara lain: penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih media)	
		000.5.9.7	Preservasi Kuratif	
		000.5.9.8	Autentikasi Arsip Statis (antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Statis)	
		000.5.9.9	Akses Arsip Statis (antara lain: Layanan arsip, Penerbitan naskah sumber)	
	000.5.10	Jasa Kearsipan (antara lain konsultasi kearsipan, manual kearsipan, penataan arsip, otomasi kearsipan, penyimpanan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip)		
	000.5.11	Pengelolaan SIKN dan JIKN		
	000.5.12	Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana		
	000.5.13	Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan		
	000.5.14	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup		
	000.5.15	Pengawasan Kearsipan		
		000.5.15.1	Pengawasan Kearsipan Internal	
		000.5.15.2	Pengawasan Kearsipan Eksternal	
		000.5.15.3	Sanksi	
000.6	PERSANDIAN			
	000.6.1	Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	000.6.2	Pengamanan persandian		
		000.6.2.1	Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kriptو	
		000.6.2.2	Analisis sinyal: teknik sandi dan kriptو	
		000.6.2.3	Materiil sandi: sistem dan peralatan	
	000.6.3	Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi		
		000.6.3.1	Perencanaan Pengkajian	
		000.6.3.2	Administrasi Pengkajian	
		000.6.3.3	Pelaksanaan	
		000.6.3.4	Pelaporan	
	000.6.4	Pembinaan dan Pengendalian Persandian		
		000.6.4.1	Sumber Daya Manusia (SDM)	
		000.6.4.2	Jaring Komunikasi	
	000.6.5	Layanan Sertifikasi Elektronik		
		000.6.5.1	Perencanaan dan Administrasi	
		000.6.5.2	Pelaksanaan Verifikasi	
		000.6.5.3	Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama	
		000.6.5.4	Penyesuaian Sistem dan Testing	
		000.6.5.5	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna	
		000.6.5.6	Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik	
		000.6.5.7	Pelaporan	
000.7	PERENCANAAN PEMBANGUNAN			
	000.7.1	Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang		
		000.7.1.1	Musrenbang Nasional	
		000.7.1.2	Musrenbang Provinsi	
		000.7.1.3	Musrenbang Kab/Kota	
		000.7.1.4	Musrenbang Kecamatan	
		000.7.1.5	Musrenbang Kelurahan	
		000.7.1.6	Musrenbang Desa	
	000.7.2	Perencanaan Pembangunan Daerah		
		000.7.2.1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang	
		000.7.2.2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	
		000.7.2.3	Rencana Anggaran Daerah	
		000.7.2.4	Rencana Pembangunan Tahunan	
		000.7.2.5	Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
		000.7.2.6	Program kerja tahunan	
		000.7.2.7	Penetapan / Kontrak Kinerja	
		000.7.2.8	Laporan Berkala	
		000.7.2.9	Laporan Insidental	
		000.7.2.10	Evaluasi Program	
	000.7.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan		
	000.7.4	Konsultasi Perencanaan Pembangunan		
	000.7.5	Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan		

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
	000.7.6	Aksi Strategis Daerah		
	000.7.6.1	Rancangan awal perencanaan aksi strategi daerah		
	000.7.6.2	Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah		
	000.7.6.3	Sosialisasi dengan Perangkat Daerah		
	000.7.6.4	Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah		
	000.7.6.5	Penerapan perencana aksi strategi daerah		
	000.7.7	Perencanaan Pendanaan Pembangunan		
	000.7.7.1	Pendanaan Nasional dan Hibah		
	000.7.7.2	Pendanaan Daerah		
	000.7.7.3	Kerjasama Pembangunan Nasional		
	000.7.7.4	Surat Berharga Syariah Negara		
	000.7.7.5	Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru		
000.8	ORGANISASI DAN TATA LAKSANA			
000.8.1	Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kab/Kota			
	000.8.1.1	Pembentukan		
	000.8.1.2	Pengubahan		
	000.8.1.3	Pembubaran		
000.8.2	Uraian Jabatan			
	000.8.2.1	Analisa Jabatan		
	000.8.2.2	Analisa Beban Kerja		
000.8.3	Ketatalaksanaan			
	000.8.3.1	Proses Bisnis		
	000.8.3.2	Standar Pelayanan		
	000.8.3.3	Standar Operasional Prosedur		
	000.8.3.4	Pelayanan Publik		
000.8.4	Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional			
000.8.5	Evaluasi Kelembagaan			
000.8.6	Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi			
	000.8.6.1	Budaya Kerja		
	000.8.6.2	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi		
	000.8.6.3	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		
000.9	PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN			
000.9.1	Kebijakan di bidang penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah			
000.9.2	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan (antara lain: Rencana Kerja, Administrasi Penelitian, Pelaksanaan, Hasil Penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan, Rekomendasi)			
000.9.3	Sosialisasi dan Desiminasi Hasil penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan			
000.9.4	Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan			
000.9.5	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi			
000.9.6	Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi			
	000.9.6.1	Data		
	000.9.6.2	Statistik		
	000.9.6.3	Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian		
000.9.7	Master proceeding/jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi			
000.9.8	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)			
000.9.9	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan			
000.9.10	Seminar, Lokakarya, Temukarya, Workshop			
100	PEMERINTAHAN			
100.1	OTONOMI DAERAH			
100.1.1	Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah			
100.1.2	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan , Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)			
100.1.3	Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)			
100.1.4	Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)			
	100.1.4.1	Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah		
	100.1.4.2	Administrasi Kepala Daerah dan DPRD		
	100.1.4.3	Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan		
	100.1.4.4	Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)		
	100.1.4.5	Assosiasi Daerah		
100.1.6	Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)			
	100.1.6.1	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		
	100.1.6.2	Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah		
	100.1.6.3	Pengembangan Kapasitas Daerah		
100.1.7	LKPJ/ LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)			
100.2	PEMERINTAHAN UMUM			
100.2.1	Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah			
100.2.2	Dekonsentrasi dan Kerjasama			
	100.2.2.1	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan		
	100.2.2.2	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah		
	100.2.2.3	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah		

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
		100.2.2.4	Fasilitas Kecamatan	
		100.2.2.5	Fasilitas Pelayanan Umum	
	100.2.3	Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
		100.2.3.1	Toponimi dan Data Wilayah	
		100.2.3.2	Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara	
		100.2.3.3	Batas Antar Daerah Wilayah	
		100.2.3.4	Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan Dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan	
		100.2.3.5	Pemeliharaan Batas Wilayah	
	100.3	HUKUM		
		100.3.1	Program Legislasi	
			100.3.1.1	Bahan/Materi Program Legislasi Daerah
			100.3.1.2	Program Legislasi
		100.3.2	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (antara lain Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan)	
		100.3.3	Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah	
			100.3.3.2	Keputusan/Ketetapan Bupati
			100.3.3.5	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten
		100.3.4	Instruksi/Surat Edaran	
			100.3.4.2	Instruksi/Surat Edaran Kabupaten
			100.3.4.4	Instruksi/Surat Edaran Setingkat Eselon II
		100.3.5	Surat Perintah	
			100.3.5.2	Surat Perintah Bupati
			100.3.5.4	Surat Perintah Setingkat Eselon II
		100.3.6	Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis	
		100.3.7	Nota Kesepakatan/Memorandum of Understanding (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama	
			100.3.7.1	Dalam Negeri
			100.3.7.2	Luar Negeri
		100.3.8	Dokumentasi Hukum (antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang dijadikan referensi)	
		100.3.9	Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum	
		100.3.10	Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Pemberian Bantuan Hukum/Konsultasi Hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)	
		100.3.11	Kasus/ Sengketa Hukum	
			100.3.11.1	Pidana Kasus/ sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran
			100.3.11.2	Perdata Kasus/sengketa perdata
			100.3.11.3	Tata Usaha Negara
			100.3.11.4	Perburuhan
			100.3.11.5	Arbitrase
			100.3.11.6	Sengketa Adat
		100.3.12	Perijinan	
		100.3.13	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	
			100.3.13.1	Hak Cipta
			100.3.13.2	Hak Paten
			100.3.13.3	Hak Desain Industri
			100.3.13.4	Hak Rahasia Dagang
			100.3.13.5	Hak Merk
		100.3.14	Permohonan HaKI yang ditolak	
200	POLITIK			
	200.1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
		200.1.1	Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		200.1.2	Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	
			200.1.2.1	Ketahanan Ideologi Negara
			200.1.2.2	Wawasan Kebangsaan
			200.1.2.3	Bela Negara
			200.1.2.4	Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan
			200.1.2.5	Pembauran dan Kewarganegaraan
		200.1.3	Kewaspadaan Nasional	
			200.1.3.1	Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan
			200.1.3.2	Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan
			200.1.3.3	Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan
			200.1.3.4	Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial
			200.1.3.5	Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing
		200.1.4	Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan	
			200.1.4.1	Ketahanan Seni
			200.1.4.2	Ketahanan Budaya
			200.1.4.3	Agama dan Kepercayaan
			200.1.4.4	Organisasi Kemasyarakatan
			200.1.4.5	Masalah Sosial Kemasyarakatan
			200.1.4.6	Fasilitasi
			200.1.4.7	Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat
			200.1.4.8	Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan Dengan Ormas/LNL
			200.1.4.9	Evaluasi Aktifitas Ormas : Sanksi Administrasi
			200.1.4.10	Fasilitasi Sengketa Ormas
			200.1.4.11	Fasilitasi Ormas

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
	200.1.5	Politik Dalam Negeri		
		200.1.5.1	Implementasi Kebijakan Politik	
		200.1.5.2	Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan	
		200.1.5.3	Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik	
		200.1.5.4	Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik Yang Memperoleh Kursi	
		200.1.5.5	Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi	
		200.1.5.6	Pemerintah Daerah	
		200.1.5.7	Database Parpol	
		200.1.5.8	Pendidikan Budaya Politik	
		200.1.5.9	Pemilihan Umum	
	200.1.6	Ketahanan Ekonomi		
		200.1.6.1	Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian	
		200.1.6.2	Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter	
		200.1.6.3	Perilaku Perekonomian Masyarakat	
		200.1.6.4	Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi	
	200.2	PEMILU		
	200.2.1	Kebijakan di bidang Pemilu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	200.2.2	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih		
		200.2.2.1	Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu	
		200.2.2.2	Daftar Pemilih Sementara (DPS)	
		200.2.2.3	Daftar Pemilih Tambahan	
		200.2.2.4	Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)	
		200.2.2.5	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)	
	200.2.3	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu		
		200.2.3.1	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari partai politik	
		200.2.3.2	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual partai politik	
		200.2.3.3	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari Calon Perseorangan	
		200.2.3.4	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faKtual	
	200.2.4	Penetapan Peserta Pemilu		
		200.2.4.1	Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota	
		200.2.4.2	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR	
		200.2.4.3	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR	
		200.2.4.4	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota	
		200.2.4.5	Peta Daerah Pemilihan	
	200.2.5	Pencalonan Pemilu		
		200.2.5.1	Petunjuk teknis pencalonan	
		200.2.5.2	Surat pencalonan pendaftaran	
		200.2.5.3	Daftar bakal calon	
		200.2.5.4	Dokumen persyaratan masing-masing bakal calon	
		200.2.5.5	Dokumen verifikasi administrasi	
		200.2.5.6	Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap	
	200.2.6	Kampanye Pemilu		
		200.2.6.1	Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye	
		200.2.6.2	Nama juru kampanye/pelaksana kampanye	
		200.2.6.3	Peringatan tertulis/penghentian kegiatan kampanye	
	200.2.7	Dana Kampanye		
		200.2.7.1	Pedoman audit dana kampanye	
		200.2.7.2	Laporan dana kampanye peserta Pemilu	
		200.2.7.3	Laporan hasil audit dana kampanye	
	200.2.8	Pemungutan dan Penghitungan Suara		
		200.2.8.1	Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara	
		200.2.8.2	Master surat suara	
		200.2.8.3	Surat suara yang terpakai	
		200.2.8.4	Surat Suara Tidak terpakai (rusak, salah, dan tidak digunakan)	
		200.2.8.5	Formulir pemilu di Pemerintah Daerah	
	200.2.9	Penetapan Hasil Pemilu		
	200.2.10	Perselisihan Hasil Pemilu		
		200.2.10.1	Surat-surat mengenai Perselisihan Hasil Pemilu	
		200.2.10.2	Jawaban dan kesimpulan termohon	
		200.2.10.3	Salinan Putusan lembaga peradilan	
	200.2.11	Laporan hasil penyelenggaraan Pemilu		
300	KEAMANAN DAN KETERTIBAN			
	300.1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	300.1.1	Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Daerah		
	300.1.2	Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja		
		300.1.2.1	Tata Operasiona Polisi Pamong Praja	
		300.1.2.2	Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja	
	300.1.3	Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja		
	300.1.4	Perlindungan Masyarakat		
	300.1.5	Penyidik Pegawai Negeri Sipil		
	300.1.6	Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia		
	300.2	PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN		
	300.2.1	Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	300.2.2	Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan		
		300.2.2.1	Rencana dan standardisasi dan pengawakan dan perbekalan	

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
			300.2.2.2	Kurikulum dan silabus, evaluasi dan monitoring
			300.2.2.3	Tenaga pencarian pertolongan, penyiapan potensi pencarian dan pertolongan
			300.2.2.4	Permasyarakatan pencarian dan pertolongan, sertifikasi pencarian dan pertolongan
			300.2.2.5	Perencanaan dan standardisasi, penyelenggaraan operasi SAR, Siaga dan latihan, tempat latihan
			300.2.2.6	Registrasi BEACON
	300.2.3			Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	300.2.4			Potensi Pencarian dan Pertolongan
	300.2.5			Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan
		300.2.5.1		Rencana Pendidikan dan Pelatihan
		300.2.5.2		Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan
		300.2.5.3		Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
		300.2.5.4		Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)
		300.2.5.5		Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
	300.2.6			Operasi Pencarian dan Pertolongan
	300.2.7			Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi
	300.2.8			Operasi Komunikasi
		300.2.8.1		Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)
		300.2.8.2		Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)
		300.2.8.3		Registrasi BEACON
	300.2.9			Inventarisasi dan Pemeliharaan
	300.2.10			Pengembangan Sistem Informasi
	300.2.11			Penyajian dan Layanan Informasi
	300.2.12			Pelapooran dan Evaluasi
		300.2.12.1		Laporan Harian
		300.2.12.2		Laporan Bulanan
		300.2.12.3		Laporoan Tahunan
		300.2.12.4		Evaluasi
400 KESEJAHTERAAN RAKYAT				
400.1 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL				
	400.1.1			Kebijakan di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	400.1.2			Pembangunan Sumber Daya
		400.1.2.1		Fasilitasi Pendidikan ketrampilan Pengembangan Sumber Daya
		400.1.2.2		Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya
		400.1.2.3		Fasilitasi Sumber daya hayati dan Pengembangan Sumber Daya
		400.1.2.4		Fasilitasi Mineral, energi dan lingkungan hidup
		400.1.2.5		Fasilitasi Teknologi dan inovasi
		400.1.2.6		Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya
		400.1.2.7		Pemantauan dan evaluasi
	400.1.3			Peningkatan Infrastruktur
		400.1.3.1		Fasilitasi Transportasi peningkatan infrastruktur
		400.1.3.2		Fasilitasi Informasi dan Telekomunikasi dalam peningkatan infrastruktur
		400.1.3.3		Fasilitasi Sosial dalam peningkatan infrastruktur
		400.1.3.4		Fasilitasi Ekonomi dalam peningkatan infrastruktur
		400.1.3.5		Fasilitasi energi dalam peningkatan infrastruktur
		400.1.3.6		Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur
		400.1.3.7		Pemantauan dan evaluasi
	400.1.4			Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha
		400.1.4.1		Fasilitasi Invenstasi pembinaan ekonomi dan dunia usaha
		400.1.4.2		Fasilitasi Kelembagaan ekonomi dan dunia usaha
		400.1.4.3		Fasilitasi Usaha mikro, kecil dan menengah
		400.1.4.4		Fasilitasi Kemitraan usaha
		400.1.4.5		Fasilitasi Pengembangan komoditas unggulan
		400.1.4.6		Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha
		400.1.4.7		Pemantauan dan evaluasi
		400.1.4.8		Identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
		400.1.4.9		Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
		400.1.4.10		Monitoring dan evaluasi Ekonomi desa tertinggal
		400.1.4.11		Identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
		400.1.4.12		Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
		400.1.4.13		Monitoring dan evaluasi Masyarakat tertinggal
		400.1.4.14		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
	400.1.5			Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya
		400.1.5.1		Penguatan kapasitas lembaga lokal
		400.1.5.2		Penguatan organisasi masyarakat
		400.1.5.3		Pemberdayaan masyarakat
		400.1.5.4		Kerjasama antar lembaga sosial dan budaya
		400.1.5.5		Ketenagakerjaan
		400.1.5.6		Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya
		400.1.5.7		Pemantauan dan evaluasi
	400.1.6			Pengembangan Daerah Khusus
		400.1.6.1		Fasilitasi pengembangan Daerah perbatasan
		400.1.6.2		Fasilitasi pengembangan Daerah rawan konflik dan bencana
		400.1.6.3		Fasilitasi pengembangan Daerah Perdesaan
		400.1.6.4		Fasilitasi pengembangan Daerah pulau terpencil dan terluar
		400.1.6.5		Fasilitasi pengembangan Wilayah strategis
		400.1.6.6		Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus
		400.1.6.7		Pemantauan dan evaluasi

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
400.2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	400.2.1	Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	400.2.2	Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum		
	400.2.2.1	Data gender		
	400.2.2.2	Advokasi dan fasilitasi		
	400.2.3	Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan)		
	400.2.3.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan		
	400.2.3.2	Data perlindungan perempuan		
	400.2.3.3	Advokasi dan fasilitasi		
	400.2.3.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan		
	400.2.3.5	Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender		
	400.2.3.6	Analisis dan penyajian informasi gender		
	400.2.3.7	Partisipasi publik untuk kesejahteraan ibu		
	400.2.4	Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan Dengan Hukum)		
	400.2.4.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak		
	400.2.4.2	Data perlindungan anak		
	400.2.4.3	Advokasi dan fasilitasi		
	400.2.4.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak		
	400.2.4.5	Partisipasi publik untuk kesejahteraan anak		
	400.2.5	Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)		
	400.2.5.1	Pemenuhan Hak Anak		
	400.2.5.2	Data Klaster Hak Anak		
	400.2.5.3	Data tumbuh kembang anak		
	400.2.5.4	Advokasi dan fasilitasi		
	400.2.5.5	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak		
	400.2.5.6	Penyelenggaraan parenting pola pengasuhan anak		
	400.2.6	Penghargaan terkait gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)		
	400.2.7	Penghargaan Kabupaten Layak Anak		
	400.2.8	Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak		
400.3	PENDIDIKAN			
	400.3.1	Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	400.3.2	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal		
	400.3.2.1	Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)		
	400.3.2.2	Pelatihan Sosial		
	400.3.2.3	Peringatan Hari anak		
	400.3.2.4	Block Grant		
	400.3.3	Pendidikan Masyarakat		
	400.3.3.1	Penyelenggaraan Program		
	400.3.3.2	Penilaian dan pemberian bantuan sosial		
	400.3.3.3	Pembinaan Program		
	400.3.3.4	Lomba/Pemberian Penghargaan		
	400.3.3.5	Pameran		
	400.3.3.6	Rakor		
	400.3.3.7	Sosialisasi		
	400.3.3.8	Sertifikasi dan Akreditasi		
	400.3.4	Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik		
	400.3.5	Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama		
	400.3.5.1	Kurikulum, bahan ajar		
	400.3.5.2	Block Grant		
	400.3.5.3	Pelatihan, Bimtek, sosialisasi,		
	400.3.5.4	Lomba, penghargaan, penganugerahan		
	400.3.5.5	Bantuan operasional sekolah (BOS)		
	400.3.5.6	Bantuan Siswa Miskin		
	400.3.6	Pendidikan khusus/Layanan Khusus		
	400.3.6.1	Kurikulum,Bahan ajar, alat bantu pembelajaran		
	400.3.6.2	Block Grant		
	400.3.6.3	Lomba, festival		
	400.3.6.4	Sosialisasi, bimtek		
	400.3.6.5	Pendataan		
	400.3.6.6	Kelembagaan		
	400.3.7	Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik		
	400.3.7.1	Pendataan dan Pemeetaan		
	400.3.7.2	Uji Kompetensi Guru		
	400.3.7.3	Sertifikasi Guru		
	400.3.7.4	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan		
	400.3.7.5	Peningkatan kesejahteraan guru		
	400.3.7.6	Sosialisasi, bimtek		
	400.3.7.7	Block Grant		
	400.3.9	Pendidikan Khusus-Layanan Khusus		
	400.3.9.1	Bahan ajar		
	400.3.9.2	Petunjuk Teknis		
	400.3.9.3	Block grant		
	400.3.9.4	Sosialisasi, bimtek		
	400.3.9.5	Lomba, sayembara, jambore, festival		
	400.3.9.6	Kurikulum/bahan pembelajaran		

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
			400.3.9.7	Alat bantu pembelajaran
			400.3.9.8	Pendataan
			400.3.9.9	Kelembagaan (Unit kesehatan sekolah, Pendidikan jasmani adaptif, pendidikan inklusi
		400.3.10	Pendidik dan Tenaga Pendidik	
			400.3.10.1	Pendataan dan Pemetaan
			400.3.10.2	Uji Kompetensi Guru
			400.3.10.3	Setifikasi Guru
			400.3.10.4	Penilaian prestasi kerja guru dan pengawas sekolah
			400.3.10.5	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
			400.3.10.6	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik
			400.3.10.7	Block grant
			400.3.10.8	Bimbingan teknis/sosialisasi
		400.3.11	Penilaian Pendidikan	
			400.3.11.1	Penilaian Akademik
			400.3.11.2	Penilaian Non Akademik
			400.3.11.3	Analisis dan Sistem Informasi Penilaian
		400.3.12	Data dan Statistik Pendidikan	
			400.3.12.1	Data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan
			400.3.12.2	Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran
		400.3.13	Prasarana dan Sarana Pendidikan	
			400.3.13.1	Prasarana Pendidikan
			400.3.13.2	Sarana Pendidikan
			400.3.13.3	Monitoring dan Evaluasi
400.4			KEOLAHRAGAAN	
		400.4.1	Kebijakan di bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		400.4.2	Pengelolaan Olahraga Pendidikan	
			400.4.2.1	Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah
			400.4.2.2	Olahraga Pendidikan Tinggi
			400.4.2.3	Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal
		400.4.3	Pengelolaan Olahraga Rekreasi	
			400.4.3.1	Olahraga Massal
			400.4.3.2	Olahraga Tradisional
			400.4.3.3	Olahraga Petualangan, Tantangan dan Wisata
		400.4.4	Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	
			400.4.4.1	Olahraga Pendidikan
			400.4.4.2	Olahraga Rekreasi
			400.4.4.3	Olahraga Prestasi
			400.4.4.4	Sekolah Khusus Olahraga
		400.4.5	Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus	
			400.4.5.1	Olahraga Tradisional
			400.4.5.2	Layanan Khusus
		400.4.6	Kemitraan dan Penghargaan Olahraga	
			400.4.6.1	Kemitraan Keolahragaan
			400.4.6.2	Penghargaan Olahraga
		400.4.7	Pembibitan dan IPTEK Olahraga	
			400.4.7.1	Pembibitan Olahraga
			400.4.7.2	Kompetisi
			400.4.7.3	IPTEK Olahraga
		400.4.8	Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan	
			400.4.8.1	Tenaga Keolahragaan
			400.4.8.2	Organisasi Keolahragaan
		400.4.9	Industri dan Promosi Olahraga	
			400.4.9.1	Industri Olahraga
			400.4.9.2	Promosi Olahraga
		400.4.10	Olahraga Prestasi	
			400.4.10.1	Daerah
			400.4.10.2	Nasional
			400.4.10.3	Internasional
		400.4.11	Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga	
			400.4.11.1	Standardisasi Keolahragaan
			400.4.11.2	Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan
			400.4.11.3	Infrastruktur Olahraga
400.5			KEPEMUDAAN	
		400.5.1	Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		400.5.2	Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda	
			400.5.2.1	Penelusuran (Duta Kepemudaan)
			400.5.2.2	Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan)
			400.5.2.3	Pengembangan
		400.5.3	Peningkatan Wawasan Pemuda	
			400.5.3.1	Wawasan Kebangsaan
			400.5.3.2	Wawasan Lingkungan
			400.5.3.3	Wawasan Sosial dan Hukum
		400.5.4	Peningkatan Kapasitas Pemuda	
			400.5.4.1	Kapasitas Iman dan Taqwa
			400.5.4.2	Kapasitas IPTEK

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
		400.5.4.3	Pemanfaatan IPTEK	
	400.5.5	Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan)		
		400.5.5.1	Pengkajian	
		400.5.5.2	Pengembangan	
		400.5.5.3	Pendayagunaan (fasilitasi)	
	400.5.6	Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda		
		400.5.6.1	Kepemimpinan : Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan	
		400.5.6.2	Kepeloporan Pemuda : Kesukarelawanan. Pengembangan kepedulian, pendampingan	
	400.5.7	Kewirausahaan		
		400.5.7.1	Kelembagaan	
		400.5.7.2	Pengaderan	
		400.5.7.3	Perintisan	
	400.5.8	Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan		
		400.5.8.1	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan : Kelembagaan dan Sumberdaya	
		400.5.8.2	Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan : Kelembagaan dan Sumberdaya	
		400.5.8.3	Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya	
		400.5.8.4	Pengawasan Kepramukaan : Kelembagaan, Program dan Sumberdaya	
	400.5.9	Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda		
		400.5.9.1	Standardisasi	
		400.5.9.2	Infrastruktur Pemuda	
	400.5.10	Kemitraan dan Penghargaan Pemuda		
		400.5.10.1	Kemitraan	
		400.5.10.2	Penghargaan Pemuda	
400.6	KEBUDAYAAN			
	400.6.1	Kebijakan di bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	400.6.2	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman		
		400.6.2.1	Registrasi Nasional	
		400.6.2.2	Pelindungan	
		400.6.2.3	Pengembangan dan Pemanfaatan	
		400.6.2.4	Eksplorasi dan Dokumentasi	
	400.6.3	Pembinaan Kesenian dan Perfilman		
		400.6.3.1	Pembinaan Seni Pertunjukan	
		400.6.3.2	Pembinaan Seni Rupa	
		400.6.3.3	Pembinaan Seni Literasi dan apresiasi film	
		400.6.3.4	Dokumentasi dan Publikasi	
	400.6.4	Sejarah dan Nilai Budaya		
		400.6.4.1	Sejarah	
		400.6.4.2	Pemetaan nilai	
		400.6.4.3	Verifikasi dan Perumusan Nilai	
		400.6.4.4	Dokumentasi dan Publikasi	
		400.6.4.5	Dokumentasi sejarah dan nilai sejarah	
		400.6.4.6	Publikasi sejarah dan nilai sejarah	
	400.6.5	Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya		
		400.6.5.1	Internalisasi nilai budaya	
		400.6.5.2	Kekayaan budaya	
		400.6.5.3	Warisan budaya nasional dan dunia	
		400.6.5.4	Diplomasi budaya	
400.7	KESEHATAN			
	400.7.1	Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	400.7.2	Upaya Kesehatan Dasar		
		400.7.2.1	Pelayanan kedokteran keluarga	
		400.7.2.2	Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer	
		400.7.2.3	Pelaksanaan kesehatan primer	
		400.7.2.4	Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas	
		400.7.2.5	Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit	
		400.7.2.6	ICD 10, Destistry & Stomatology	
		400.7.2.7	Infeksi menular lewat transfusi darah	
		400.7.2.8	Penyakit mulut di tingkat primer	
		400.7.2.9	Pembiayaan darah	
		400.7.2.10	Penggunaan darah rasional	
		400.7.2.11	Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah	
		400.7.2.12	Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan	
		400.7.2.13	Akreditasi puskesmas	
		400.7.2.14	Puskesmas berprestasi	
	400.7.3	Upaya Kesehatan Rujukan		
		400.7.3.1	Pelayanan kesehatan rujukan	
		400.7.3.2	Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan (KUK)	
		400.7.3.3	Pelayanan rumah sakit privat	
		400.7.3.4	Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya	
		400.7.3.5	Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan	
		400.7.3.6	Pelayanan pasien jaminan kesehatan	
		400.7.3.7	Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa	
		400.7.3.8	Badan pengawas rumah sakit	
		400.7.3.9	Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)	
		400.7.3.10	Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya	
	400.7.4	Keperawatan dan keteknisian medik		

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
		400.7.4.1	Pelayanan Keperawatan Dasar	
		400.7.4.2	Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit	
		400.7.4.3	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum	
		400.7.4.4	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus	
		400.7.4.5	Bina pelayanan kebidanan	
	400.7.5	Penunjang medik dan sarana kesehatan		
		400.7.5.1	Mikrobiologi dan imunologi	
		400.7.5.2	Patologi dan toksilogi	
		400.7.5.3	Radiologi	
		400.7.5.4	Perizinan dan sertifikasi	
		400.7.5.5	Sarana dan prasarana kesehatan	
		400.7.5.6	Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan	
		400.7.5.7	Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan	
	400.7.6	Kesehatan Jiwa		
		400.7.6.1	Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan	
		400.7.6.2	Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan	
		400.7.6.3	Etikolegal dan asesmen	
		400.7.6.4	Pencegahan dan penanggulangan narkotika dan sejenisnya	
		400.7.6.5	Etikolegal dan asesmen	
		400.7.6.6	Kesehatan jiwa kelompok beresiko	
	400.7.7	Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra		
		400.7.7.1	Surveilans dan respon kejadian luar biasa	
		400.7.7.2	Imunisasi	
		400.7.7.3	Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan	
		400.7.7.4	Kesehatan matra	
	400.7.8	Pengendalian penyakit menular langsung		
		400.7.8.1	Pengendalian tuberkolosis	
		400.7.8.2	Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual	
		400.7.8.3	Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut	
		400.7.8.4	Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan	
		400.7.8.5	Pengendalian kusta dan frambusia	
	400.7.9	Pengendalian penyakit bersumber binatang		
		400.7.9.1	Pengendalian malaria	
		400.7.9.2	Pengendalian arbovirosis	
		400.7.9.3	Pengendalian zoonosis	
		400.7.9.4	Pengendalian filariasis dan kecacingan	
	400.7.10	Pengendalian penyakit tidak menular		
		400.7.10.1	Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah	
		400.7.10.2	Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik	
		400.7.10.3	Penyakit kanker	
		400.7.10.4	Penyakit kronis dan generatif	
		400.7.10.5	Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan	
	400.7.11	Penyehatan lingkungan		
		400.7.11.1	Penyehatan air dan sanitasi dasar	
		400.7.11.2	Pemukiman dan tempat umum	
		400.7.11.3	Kawasan dan sanitasi darurat	
		400.7.11.4	Higien sanitasi pangan	
		400.7.11.5	Pengamanan limbah, udara, radiasi	
	400.7.12	Pengembangan teknologi laboratorium dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan		
	400.7.13	Gizi		
		400.7.13.1	Gizi makro	
		400.7.13.2	Gizi mikro	
		400.7.13.3	Gizi klinik dan diatetik	
		400.7.13.4	Konsumsi makanan dan jasa makanan	
		400.7.13.5	Kewaspadaan gizi	
	400.7.14	Kesehatan ibu		
		400.7.14.1	Kesehatan ibu hamil	
		400.7.14.2	Kesehatan ibu bersalin dan nifas	
		400.7.14.3	Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi	
		400.7.14.4	Keluarga berencana	
		400.7.14.5	Perlindungan kesehatan reproduksi	
	400.7.15	Kesehatan anak		
		400.7.15.1	Kelangsungan hidup bayi	
		400.7.15.2	Kelangsungan anak balita dan pra sekolah	
		400.7.15.3	Kewaspadaan penanganan balita beresiko	
		400.7.15.4	Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja	
		400.7.15.5	Perlindungan kesehatan anak	
	400.7.16	Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer		
		400.7.16.1	Kesehatan tradisional keterampilan	
		400.7.16.2	Kesehatan tradisional ramuan	
		400.7.16.3	Kesehatan alternatif dan komplementer	
		400.7.16.4	Penapisan dan kemitraan	
	400.7.17	Kesehatan kerja dan Olah raga		
		400.7.17.1	Pelayanan kesehatan kerja	
		400.7.17.2	Kapasitas kerja	
		400.7.17.3	Lingkungan kerja	
		400.7.17.4	Kemitraan kesehatan kerja	
		400.7.17.5	Kesehatan perkotaan	

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
			400.7.17.6	Kesehatan olahraga
		400.7.18		Obat Publk dan perbekalan kesehatan
			400.7.18.1	Harga obat publik
			400.7.18.2	Pengadaan obat
			400.7.18.3	Perbekalan kesehatan
		400.7.19		Produksi dan distribusi alat kesehatan
			400.7.19.1	Alat kesehatan
			400.7.19.2	Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat
			400.7.19.3	Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga
		400.7.20		Kefarmasian
			400.7.20.1	Pelayanan kefarmasian
			400.7.20.2	Farmasi klinis
			400.7.20.3	Farmasi Komunitas
			400.7.20.4	Penggunaan obat rasional
		400.7.21		Produksi dan distribusi kefarmasian
			400.7.21.1	Obat tradisional
			400.7.21.2	Kosmetik dan makanan
			400.7.21.3	Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus
			400.7.21.4	Kemandirian obat dan bahan baku obat
		400.7.22		Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan
			400.7.22.1	Surat keterangan
			400.7.22.2	Sertifikasi dan perijinan
		400.7.23		Penanggulangan Krisis Kesehatan
			400.7.23.1	Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
			400.7.23.2	Tanggap darurat dan pemulihan
			400.7.23.3	Pemantauan dan informasi
			400.7.23.4	Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan
			400.7.23.5	Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana
		400.7.24		Pengembangan dan Jaminan Kesehatan
			400.7.24.1	Tersedianya data NHA setiap tahun
			400.7.24.2	Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN
		400.7.25		Intelegensia Kesehatan
			400.7.25.1	Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan
			400.7.25.2	Penanggulangan masalah inteligensia kesehatan
		400.7.26		Kesehatan Haji
			400.7.26.1	Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji
			400.7.26.2	Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji
		400.7.27		Promosi Kesehatan
			400.7.27.1	Sarana Promosi Kesehatan
			400.7.27.2	Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran
			400.7.27.3	Pengembangan pesan promosi kesehatan
			400.7.27.4	Hari kesehatan
		400.7.28		Data dan Informasi
			400.7.28.1	Statistik kesehatan
			400.7.28.2	Analisis dan diseminasi informasi
			400.7.28.3	Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan
		400.7.29		Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen
			400.7.29.1	Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik
			400.7.29.2	Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
			400.7.29.3	Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
			400.7.29.4	Obat Asli Indonesia
		400.7.30		Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
			400.7.30.1	Penilaian keamanan pangan
			400.7.30.2	Standardisasi produk pangan
			400.7.30.3	Inspeksi dan sertifikasi produk pangan
			400.7.30.4	Surveilan dan penyuluhan keamanan pangan
			400.7.30.5	Pengawasan produk dan bahan berbahaya
		400.7.31		Rekam Medis
		400.8		AGAMA DAN KEPERCAYAAN
			400.8.1	Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
			400.8.2	Fasilitasi
			400.8.2.1	Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)
			400.8.2.2	Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan
			400.8.2.3	Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayaan
			400.8.2.4	Kasus Keagamaan
			400.8.2.5	Kasus Aliran Keagamaan
		400.8.3		Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME
			400.8.3.1	Kelembagaan dan kepercayaan
			400.8.3.2	Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama
			400.8.3.3	Komunitas Kepercayaan
			400.8.3.4	Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional
			400.8.3.5	Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial
		400.9		SOSIAL
			400.9.1	Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
			400.9.2	Kesejahteraan Sosial Anak
			400.9.2.1	Kesejahteraan sosial anak balita

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
			400.9.2.2	Kesejahteraan sosial anak terlantar
			400.9.2.3	Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum
			400.9.2.4	Kesejahteraan sosial anak dengan kecatatan
			400.9.2.5	Kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus
		400.9.3	Rehabilitasi Sosial	
			400.9.3.1	Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental
			400.9.3.2	Kelembagaan dan advokasi sosial
			400.9.3.3	Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan sosial
		400.9.4	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	
			400.9.4.1	Gelandangan, pengemis dan pemulung
			400.9.4.2	Tuna susila dan korban trafficking perempuan
			400.9.4.3	Warga binaan lembaga pemasyarakatan meliputi penyiapan, reintegrasi
			400.9.4.4	Pelayanan sosial orang dengan HIV / AIDS dan kelompok minoritas
		400.9.5	Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA	
		400.9.6	Pelayanan sosial lanjut usia	
			400.9.6.1	Pelayanan sosial dalam dan luar panti
			400.9.6.2	Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama lembaga
			400.9.6.3	Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan
		400.9.7	Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial	
		400.9.8	Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	
		400.9.9	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	
			400.9.9.1	Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan Sumber Daya
			400.9.9.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
			400.9.9.3	Pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi sosial
			400.9.9.4	Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah
		400.9.10	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	
			400.9.10.1	Kesiapsiagaan dan mitigasi
			400.9.10.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
			400.9.10.3	Pemulihan sosial dan penguatan sosial
			400.9.10.4	Kerjasama
		400.9.11	Jaminan Sosial	
			400.9.11.1	Seleksi dan vrfikasi
			400.9.11.2	Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi
			400.9.11.3	Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran
			400.9.11.4	Kerjasama
		400.9.12	Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial	
			400.9.12.1	Ketahanan keluarga
			400.9.12.2	Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan
			400.9.12.3	Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial
			400.9.12.4	Kemitraan dunia usaha
			400.9.12.5	Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas
		400.9.13	Pemberdayaan komunitas adat terpencil	
			400.9.13.1	Persiapan pemberdayaan
			400.9.13.2	Pemberdayaan sumber daya manusia
			400.9.13.3	Penggalian dan pengembangan potensi
			400.9.13.4	Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil
			400.9.13.5	Kerjasama kelembagaan
		400.9.14	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan	
			400.9.14.1	Identifikasi dan analisis
			400.9.14.2	Pengembangan kapasitas
			400.9.14.3	Penataan sosial lingkungan kumuh
			400.9.14.4	Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas
			400.9.14.5	Bantuan Langsung
			400.9.14.6	Kerjasama Kelembagaan
		400.9.15	Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial	
			400.9.15.1	Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan
			400.9.15.2	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keberintisan
			400.9.15.3	Pengembangan kesetiakawanan sosial
			400.9.15.4	Pengelolaan taman makam pahlawan
		400.10	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
			400.10.1	Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
			400.10.2	Pemerintahan Desa dan Kelurahan
			400.10.2.1	Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan
			400.10.2.2	Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
			400.10.2.3	Fasilitasi Permusyawaratan Desa
			400.10.2.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
			400.10.2.5	Pengembangan Kapasitas Desa
		400.10.3	Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat	
			400.10.3.1	Lembaga Masyarakat
			400.10.3.2	Pembangunan Partisipatif
			400.10.3.3	Pendataan Potensi Masyarakat
			400.10.3.4	Pengembangan Kawasan Perdesaan
			400.10.3.5	Pelatihan Masyarakat
		400.10.4	Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat	
			400.10.4.1	Budaya Nusantara

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
		400.10.4.2	Pemberdayaan Perempuan	
		400.10.4.3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	
		400.10.4.4	Kesejahteraan Sosial	
		400.10.4.5	Tenaga Kerja Pedesaan	
	400.10.5	Usaha Ekonomi Masyarakat		
		400.10.5.1	Usaha Pertanian dan Pangan	
		400.10.5.2	Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam	
		400.10.5.3	Produksi dan Pemasaran	
		400.10.5.4	Usaha Ekonomi dan Keluarga	
		400.10.5.5	Ekonomi Pedesaan dan Masyarakat Tertinggal	
	400.10.6	Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Pedesaan		
		400.10.6.1	Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Pedesaan	
		400.10.6.2	Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Pedesaan	
		400.10.6.3	Fasilitasi Prasarana dan Sarana Pedesaan	
		400.10.6.4	Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Pedesaan	
		400.10.6.5	Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Pedesaan	
	400.10.7	Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)		
400.11	PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN			
	400.11.1	Kebijakan di bidang Pertamanan dan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	400.11.2	Pertamanan		
		400.11.2.1	Perencanaan Pertamanan	
		400.11.2.2	Taman Kota	
		400.11.2.3	Tata Hias dan Ornamen Kota	
	400.11.3	Pemakaman		
		400.11.3.1	Perencanaan Pemakaman	
		400.11.3.2	Pemakaman	
		400.11.3.3	Pelayanan Pemakaman	
	400.11.4	Jalur Hijau		
		400.11.4.1	Perencanaan Jalur Hijau	
		400.11.4.2	Jalur Hijau Jalan	
		400.11.4.3	Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air	
	400.11.5	Peran Serta Masyarakat		
	400.11.6	Pengawasan dan Penindakan		
	400.11.7	Pengelolaan Data		
	400.11.8	Evaluasi dan Pelaporan		
400.12	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			
	400.12.1	Kebijakan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.		
	400.12.2	Pendaftaran Penduduk		
		400.12.2.1	Identitas Penduduk	
		400.12.2.2	Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI	
		400.12.2.3	Pindah Datang Penduduk Antar Negara	
		400.12.2.4	Pendataan Penduduk Rentan	
		400.12.2.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	
	400.12.3	Pencatatan Sipil		
		400.12.3.1	Kelahiran dan Kematian	
		400.12.3.2	Perkawinan dan Perceraian	
		400.12.3.3	Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan	
		400.12.3.4	Pencatatan Kewarganegaraan	
		400.12.3.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	
	400.12.4	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
		400.12.4.1	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	
		400.12.4.2	Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan	
		400.12.4.3	Pengelolaan data Administrasi Kependudukan	
		400.12.4.4	Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	
		400.12.4.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	
	400.12.5	Pengembangan Kebijakan Kependudukan		
		400.12.5.1	Kuantitas Penduduk	
		400.12.5.2	Kualitas Penduduk	
		400.12.5.3	Mobilitas Penduduk	
		400.12.5.4	Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk	
		400.12.5.5	Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi	
	400.12.6	Penyerasian Kependudukan		
		400.12.6.1	Indikator Kependudukan	
		400.12.6.2	Proyeksi Penduduk	
		400.12.6.3	Perencanaan Kependudukan	
		400.12.6.4	Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah	
		400.12.6.5	Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah	
400.13	KELUARGA BERENCANA			
	400.13.1	Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	400.13.2	Analisis pengaduan kebijakan pengendalian penduduk		
		400.13.2.1	Pengumpulan dan pengolahan data	
		400.13.2.2	Evaluasi dan pelaporan	
	400.13.3	Fasilitas pengaduan kebijakan pengendalian penduduk		
		400.13.3.1	Penyiapan fasilitas	

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
		400.13.3.2	Evaluasi dan pelaporan	
	400.13.4	Profil dan proyeksi penduduk		
		400.13.4.1	Data profil dan proyeksi penduduk	
		400.13.4.2	Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk	
	400.13.5	Penetapan parameter pengendalian penduduk		
		400.13.5.1	Penetapan sasaran parameter	
		400.13.5.2	Evaluasi sasaran parameter	
	400.13.6	Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk		
		400.13.6.1	Pemanfaatan profil dan proyeksi	
		400.13.6.2	Pemanfaatan parameter	
	400.13.7	Pengembangan Sistem		
		400.13.7.1	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal	
		400.13.7.2	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	
	400.13.8	Pengembangan Materi		
		400.13.8.1	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal	
		400.13.8.2	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	
	400.13.9	Monitoring dan Evaluasi		
		400.13.9.1	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal	
		400.13.9.2	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	
	400.13.10	Analisis Sosial		
	400.13.11	Analisis Ekonomi		
	400.13.12	Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan		
	400.13.13	Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan		
	400.13.14	Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah		
	400.13.15	Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana		
	400.13.16	Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah		
		400.13.16.1	Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah	
		400.13.16.2	Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah	
	400.13.17	Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta		
	400.13.18	Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta		
	400.13.19	Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta		
		400.13.19.1	Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta	
		400.13.19.2	Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta	
	400.13.20	Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan		
		400.13.20.1	Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan	
		400.13.20.2	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan	
	400.13.21	Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan		
		400.13.21.1	Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan	
		400.13.21.2	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan	
	400.13.22	Kesertaan keluarga berencana pria		
		400.13.22.1	Peningkatan akses keluarga berencana pria	
		400.13.22.2	Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria	
	400.13.23	Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak		
	400.13.24	Pencegahan PMS dan HIV/AIDS		
	400.13.25	Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas		
	400.13.26	Pelebagaan bina keluarga Balita dan anak		
		400.13.26.1	Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak	
		400.13.26.2	Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak	
	400.13.27	Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak		
		400.13.27.1	Monitoring bina keluarga Balita dan anak	
		400.13.27.2	Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak	
	400.13.28	Pelebagaan bina ketahanan remaja		
		400.13.28.1	Pelebagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan	
		400.13.28.2	Pelebagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat	
	400.13.29	Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja		
		400.13.29.1	Monitoring bina ketahanan remaja	
		400.13.29.2	Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja	
	400.13.30	Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan		
		400.13.30.1	Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia	
		400.13.30.2	Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan	
	400.13.31	Pelebagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan		
		400.13.31.1	Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
		400.13.31.2	Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	
	400.13.32	Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan		
		400.13.32.1	Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	
		400.13.32.2	Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan	
	400.13.33	Pengembangan program usaha ekonomi keluarga		
	400.13.34	Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga		
	400.13.35	Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga		
		400.13.35.1	Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga	
		400.13.35.2	Pengemangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga	
	400.13.36	Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga		
	400.13.37	Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera		
	400.13.38	Pelebagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera		
		400.13.38.1	Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	
		400.13.38.2	Pengembangan Kemiitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	
	400.13.39	Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera		
		400.13.39.1	Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	
		400.13.39.2	Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	
	400.13.40	Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi		
		400.13.40.1	Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi	
		400.13.40.2	Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi	
	400.13.41	Advokasi dan pencitraan		
	400.13.42	Komunikasi, Informasi dan Edukasi		
		400.13.42.1	Promosi	
		400.13.42.2	Sarana produksi media komunikasi	
		400.13.42.3	Produk media komunikasi	
	400.13.43	Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi		
	400.13.44	Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota		
		400.13.44.1	Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota	
		400.13.44.2	Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota	
	400.13.45	Hubungan dengan lembaga nonpemerintah		
		400.13.45.1	Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah	
		400.13.45.2	Penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah	
	400.13.46	Tenaga Lini Lapangan		
		400.13.46.1	Pengembangan tenaga lini lapangan	
		400.13.46.2	Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan	
	400.13.47	Institusi Masyarakat Pedesaan		
		400.13.47.1	Pengembangan institusi masyarakat pedesaan	
		400.13.47.2	Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan	
	400.13.48	Mekanisme Operasional lini lapangan		
		400.13.48.1	Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan	
		400.13.48.2	Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan	
	400.13.49	Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan		
		400.13.49.1	Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan	
		400.13.49.2	Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan	
	400.13.50	Pengumpulan dan pengolahan data		
	400.13.51	Analisis dan evaluasi		
		400.13.51.1	Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk	
		400.13.51.2	Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera	
	400.13.52	Sistem aplikasi dan bank data		
		400.13.52.1	Pengembangan sistem aplikasi	
		400.13.52.2	Pengelolaan bank data	
	400.13.53	Infrastruktur teknologi informasi		
		400.13.53.1	Pengembangan infrastruktur teknologi informasi	
		400.13.53.2	Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi	
	400.13.54	Dokumentasi dan penyebarluasan informasi		
		400.13.54.1	Dokumentasi dan perpustakaan	
		400.13.54.2	Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi	
400.14	HUBUNGAN MASYARAKAT			
	400.14.1	Keprotokolan		
		400.14.1.1	Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)	
		400.14.1.2	Buku tamu Keprotokolan	
		400.14.1.3	Agenda kegiatan pimpinan daerah	
		400.14.1.4	Kunjungan dinas dalam dan luar negeri	
	400.14.2	Daftar nama/alamat kantor /pejabat		
	400.14.3	Dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media : kertas, foto/video/rekaman suara/multi media		

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
	400.14.4	Pengumpulan,pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan		
	400.14.4.1	Kliping koran		
	400.14.4.2	Brosur/Leaflet/poster/plakat		
	400.14.4.3	Pengumuman/pemberitaan		
	400.14.5	Hubungan antar lembaga dan Pemerintahan Daerah		
	400.14.5.1	Hubungan antar lembaga pemerintah		
	400.14.5.2	Hubungan dengan organisasi sosial / LSM		
	400.14.5.3	Hubungan dengan perusahaan		
	400.14.5.4	Hubungan dengan Perguruan Tinggi/sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapang (PKL)		
	400.14.5.5	Forum Kehumasan		
	400.14.5.6	Hubungan dengan Media Massa		
	400.14.6	Dengar pendapat/hearing DPRD		
	400.14.7	Bahan/materi pidato/sidang Muspida		
	400.14.8	Penerbitan Majalah,buletin,koran dan jurnal		
	400.14.9	Publikasi melalui media cetak maupun elektronik		
	400.14.10	Pameran/sayemara/lomba/festival,pembuatan spanduk dan iklan		
	400.14.11	Penghargaan/tanda kenang-kenangan		
	400.14.12	Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf		
500 PEREKONOMIAN				
500.1	KETAHANAN PANGAN			
	500.1.1	Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah		
	500.1.2	Ketersediaan dan Kerawanan Pangan		
	500.1.2.1	Ketersediaan Pangan		
	500.1.2.2	Akses Pangan		
	500.1.2.3	Kerawanan Pangan		
	500.1.3	Distribusi dan Cadangan Pangan		
	500.1.3.1	Distribusi Pangan		
	500.1.3.2	Harga Pangan		
	500.1.3.3	Cadangan Pangan		
	500.1.4	Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan		
	500.1.4.1	Konsumsi Pangan		
	500.1.4.2	Penganekaragaman Pangan		
	500.1.4.3	Keamanan Pangan Segar		
	500.1.5	Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan		
	500.1.5.1	Dewan Ketahanan Pangan		
	500.1.5.2	Penghargaan Ketahan Pangan		
	500.1.6	Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)		
	500.1.7	Bimbingan Teknis		
	500.1.8	Evaluasi		
500.2	PERDAGANGAN			
	500.2.1	Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	500.2.2	Perdagangan Dalam Negeri		
	500.2.2.1	Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha		
	500.2.2.2	Bisa Usaha Jasa Perdangan		
	500.2.2.3	Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan		
	500.2.2.4	Informasi Perusahaan		
	500.2.2.5	Pelaku Pasar		
	500.2.2.6	Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah		
	500.2.2.7	Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah		
	500.2.2.8	Pengembangan Produk Lokal		
	500.2.2.9	Pencitraan Produk Dalam Negeri		
	500.2.2.10	Pengembangan Sarana Distribusi		
	500.2.2.11	Pengelolaan Sarana Distribusi		
	500.2.2.12	Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik		
	500.2.2.13	Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik		
	500.2.2.14	Informasi Pasar		
	500.2.2.15	Informasi Hasil Industri		
	500.2.2.16	Barang Strategis		
	500.2.2.17	Bahan Pokok Agro		
	500.2.3	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen		
	500.2.3.1	Kelembagaan dan informasi standar		
	500.2.3.2	Kerjasama Standarisasi		
	500.2.3.3	Perumusan dan penerapan standar		
	500.2.3.4	Tata usaha		
	500.2.3.5	Kerjasama, informasi, dan publikasi		
	500.2.3.6	Analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen		
	500.2.3.7	Bimbingan konsumen dan pelaku usaha		
	500.2.3.8	Fasilitas kelembagaan		
	500.2.3.9	Produk pertambangan dan aneka industri		
	500.2.3.10	Produk pertanian, kimia dan kehutanan		
	500.2.3.11	Jasa		
	500.2.3.12	Kerjasama		
	500.2.3.13	Sarana dan Kerjasama		
	500.2.3.14	Kelembagaan dan dan penilaian		
	500.2.3.15	UTTP dan Standar Ukuran		
	500.2.3.16	Pengawasan		

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
			500.2.3.17	Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran
			500.2.3.18	Balai Pengujian UTTP
	500.2.4		Perdagangan Berjangka Komoditi	
		500.2.4.1	Pengkajian pasar	
		500.2.4.2	Pengawasan Transaksi	
		500.2.4.3	Pengawasan Keuangan dan Audit	
		500.2.4.4	Pengkajian pasar	
		500.2.4.5	Pengembangan Pasar	
		500.2.4.6	Sistem informasi	
		500.2.4.7	Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang	
		500.2.4.8	Pengawasan pasar lelang	
		500.2.4.9	Pengawasan sistem gudang	
	500.2.5		Bimbingan Teknis	
	500.2.6		Evaluasi	
500.3	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH			
	500.3.1		Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	500.3.2		Kelembagaan Koperasi dan UKM	
		500.3.2.1	Organisasi dan Badan Hukum Koperasi	
		500.3.2.2	Tata Laksana Koperasi dan UKM	
		500.3.2.3	Keanggotaan Koperasi	
		500.3.2.4	Pengendalian dan Akuntabilitas	
	500.3.3		Produksi	
		500.3.3.1	Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		500.3.3.2	Kehutanan dan Perkebunan	
		500.3.3.3	Perikanan dan Peternakan	
		500.3.3.4	Industri Kerajinan dan Pertambangan	
		500.3.3.5	Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha	
	500.3.4		Pembiayaan	
		500.3.4.1	Program Pendanaan	
		500.3.4.2	Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam	
		500.3.4.3	Urusan Permodalan	
		500.3.4.4	Asuransi dan Jasa Keuangan	
		500.3.4.5	Pembiayaan dan Penjaminan Kredit	
		500.3.4.6	Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)	
	500.3.5		Pemasaran dan Jaringan Usaha	
		500.3.5.1	Perdagangan Dalam Negeri	
		500.3.5.2	Ekspor dan Impor	
		500.3.5.3	Sarana dan Prasarana Pemasaran	
		500.3.5.4	Kemitraan dan Jaringan Usaha	
		500.3.5.5	Informasi dan Publikasi Bisnis	
		500.3.5.6	Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM	
	500.3.6		Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		500.3.6.1	Pengembangan Kewirausahaan	
		500.3.6.2	Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM	
		500.3.6.3	Peran Serta Masyarakat	
		500.3.6.4	Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM	
		500.3.6.5	Advokasi	
	500.3.7		Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha	
		500.3.7.1	Produktifitas dan Mutu	
		500.3.7.2	Restrukturisasi Usaha	
		500.3.7.3	Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)	
		500.3.7.4	Fasilitasi Investasi UKMK	
		500.3.7.5	Pengembangan Sarana Bisnis	
	500.3.8		Pengkajian Sumber Daya UKMK	
		500.3.8.1	Penelitian Koperasi	
		500.3.8.2	Penelitian UKM	
		500.3.8.3	Penelitian Sumber Daya	
		500.3.8.4	Pengembangan Perkaderan UMK	
	500.3.9		Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga	
	500.3.10		Pedagang Kaki Lima (PKL)	
		500.3.10.1	Peraturan Perundang-Undangan	
		500.3.10.2	Sarana dan Prasarana	
	500.3.11		Monitoring dan Evaluasi	
500.4	KEHUTANAN			
	500.4.1		Kebijakan di bidang Kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
500.5	KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	500.5.1		Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	500.5.2		Perikanan Tangkap	
		500.5.2.1	Data dan Statistik Perikanan Tangkap	
		500.5.2.2	Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan	
		500.5.2.3	Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan	
		500.5.2.4	Pendaftaran Kapal Perikanan	
		500.5.2.5	Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan	
		500.5.2.6	Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	
		500.5.2.7	Alokasi Usaha Penangkapan Ikan	

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
			500.5.2.8	Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan
			500.5.2.9	Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan
			500.5.2.10	Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan
			500.5.2.11	Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan
			500.5.2.12	Kelembgaan Usaha Penangkapan
			500.5.2.13	Investasi dan Permodalan Usaha
			500.5.2.14	Kenelayanan
			500.5.2.15	Pembinaan Pengelolaan Usaha
			500.5.2.16	Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan
	500.5.3			Perikanan Budidaya
			500.5.3.1	Potensi Lahan dan Air
			500.5.3.2	Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar
			500.5.3.3	Pengelolaan Induk Perbenihan ikan air tawar
			500.5.3.4	Perbenihan Skala Kecil
			500.5.3.5	Informasi dan Distribusi Pembenihan
			500.5.3.6	Budidaya Air Tawar
			500.5.3.7	Budidaya Ikan Hias
			500.5.3.8	Sertifikasi Budidaya Perikanan
			500.5.3.9	Data dan Statistik Perikanan Budidaya
			500.5.3.10	Hama dan Penyakit Ikan
			500.5.3.11	Perlindungan Lingkungan Budidaya
			500.5.3.12	Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya
			500.5.3.13	Kewirausahaan Budidaya
			500.5.3.14	Pelayanan Usaha Budidaya
			500.5.3.15	Kelembagaan dan Ketenagaakerjaan
			500.5.3.16	Promosi Usaha dan Budaya
	500.5.4			Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
			500.5.4.1	Standarisasi Pengolahan Hasil
			500.5.4.2	Pengembangan Produk
			500.5.4.3	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
			500.5.4.4	Industri Pengolahan
			500.5.4.5	Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil
			500.5.4.6	Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi
			500.5.4.7	Promosi dan Jaringan Ikan Hias
			500.5.4.8	Pengembangan Industri
			500.5.4.9	Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Non Konsumsi
			500.5.4.10	Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri
			500.5.4.11	Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri
			500.5.4.12	Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri
			500.5.4.13	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri
			500.5.4.14	Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri
			500.5.4.15	Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri
			500.5.4.16	Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri
			500.5.4.17	Pengembangan Ekspor
			500.5.4.18	Pengembangan Impor
			500.5.4.19	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri
			500.5.4.20	Pelayanan Usaha
			500.5.4.21	Kemitraan Usaha
			500.5.4.22	Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran
			500.5.4.23	Investasi dan Permodalan
			500.5.4.24	Informasi dan Promosi
	500.5.5			Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
			500.5.5.1	Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi
			500.5.5.2	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I
			500.5.5.3	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II
			500.5.5.4	Informasi dan Evaluasi Spasial
			500.5.5.5	Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi
			500.5.5.6	Konservasi Wawasan
			500.5.5.7	Konservasi Jenis Ikan
			500.5.5.8	Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan
			500.5.5.9	Mitigasi Bencana Lingkungan
			500.5.5.10	Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan
			500.5.5.11	Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut
			500.5.5.12	Rehabilitasi dan Reklamasi
			500.5.5.13	Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil
			500.5.5.14	Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Terkecil
			500.5.5.15	Investasi dan Promosi Pulau-Pulau Terkecil
			500.5.5.16	Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Terkecil
			500.5.5.17	Akses Permodalan
			500.5.5.18	Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
			500.5.5.19	Sosial Budaya Masyarakat
			500.5.5.20	Pengembangan Usaha
	500.5.6			Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
			500.5.6.1	Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat
			500.5.6.2	Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur
			500.5.6.3	Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran
			500.5.6.4	Pengawasan Usaha Budidaya
			500.5.6.5	Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi
			500.5.6.6	Pengawasan Pencemaran Perairan

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
			500.5.6.7	Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil
			500.5.6.8	Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Non Hayati
			500.5.6.9	Logistik dan Operasional Wilayah Barat
			500.5.6.10	Logistik dan Operasional Wilayah Timur
			500.5.6.11	Perawatan Kapal Pengawas
			500.5.6.12	Pengawakan Kapal Pengawas
			500.5.6.13	Sistem Pemantauan
			500.5.6.14	Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan
			500.5.6.15	Pemantauan Sumber Daya Perikanan
			500.5.6.16	Pengembangan Infrastruktur Pengawasan
			500.5.6.17	Penyidikan
			500.5.6.18	Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal
			500.5.6.19	Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan
			500.5.6.20	Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran
	500.5.7		Karantina Ikan	
			500.5.7.1	Pemeriksaan Ikan
			500.5.7.2	Penahanan
			500.5.7.3	Pengasingan
			500.5.7.4	Pengamatan
			500.5.7.5	Pengakuan
			500.5.7.6	Penolakan
			500.5.7.7	Pemusnahan
			500.5.7.8	Persyaratan lalu Lintas Pemasukan
			500.5.7.9	Persyaratan lalu Lintas Pengeluaran
			500.5.7.10	Permohonan Sertifikat
			500.5.7.11	Pemasukan Formulir
			500.5.7.12	Pemasukan Sertifikat
			500.5.7.13	Evaluasi dan Monitoring Sertifikat
			500.5.7.14	Surat Perintah
			500.5.7.15	Rekomendasi
			500.5.7.16	Penutupan Suatu Area
			500.5.7.17	Pelanggaran Lalu Lintas Ikan
			500.5.7.18	Pengawasan Peraturan Perkarantinaan
			500.5.7.19	Pengawasan Pelaksanaan Operasional
			500.5.7.20	Instalasi Karantina Sementara
			500.5.7.21	Lokasi Karantina
	500.6		PERTANIAN	
		500.6.1	Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		500.6.2	Perlindungan hortikultura	
			500.6.2.1	Perlindungan Tanaman Buah
			500.6.2.2	Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat
			500.6.2.3	Perlindungan Tanaman Florikultura
			500.6.2.4	Dampak iklim dan Persyaratan Teknis
		500.6.3	Perbenihan Hortikultura	
			500.6.3.1	Penilaian Varietas
			500.6.3.2	Pengawasan Mutu Benih
			500.6.3.3	Budidaya dan Pascapanen Florikultura
		500.6.4	Perluasan dan Pengelolaan Lahan	
			500.6.4.1	Basis Data Lahan
			500.6.4.2	Pengendalian Lahan
			500.6.4.3	Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan
			500.6.4.4	Perluasan Kawasan Tanaman Pangan
			500.6.4.5	Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan
		500.6.5	Pengelolaan Air Irigasi	
			500.6.5.1	Pengembangan Sumber Air
			500.6.5.2	Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air
			500.6.5.3	Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup
			500.6.5.4	Kelembagaan
		500.6.6	Pembiayaan Pertanian	
			500.6.6.1	Pembiayaan Program
			500.6.6.2	Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama
			500.6.6.3	Pembiayaan agribisnis
			500.6.6.4	Kelembagaan dan Pemberdayaan agribisnis
		500.6.7	Pupuk Pestisida	
			500.6.7.1	Pupuk Organik dan Pembenah Tanah
			500.6.7.2	Pupuk Anorganik
			500.6.7.3	Pestisida
			500.6.7.4	Pengawasan Pupuk dan Pestisida
		500.6.8	Alat dan Mesin Pertanian	
			500.6.8.1	Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
			500.6.8.2	Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian
			500.6.8.3	Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian
		500.6.9	Perbenihan Tanaman Pangan	
			500.6.9.1	Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih
			500.6.9.2	Produksi Benih Sereal
			500.6.9.3	Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi
			500.6.9.4	Kelembagaan Benih
		500.6.10	Budidaya Sereal	

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
			500.6.10.1	Padi Irigasi dan Rawa
			500.6.10.2	Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering
			500.6.10.3	Jagung
			500.6.10.4	Serealiala Lain
	500.6.11			Budidaya Aneka Kacang dan Umbi
			500.6.11.1	Kedelai
			500.6.11.2	Ubi Kayu
			500.6.11.3	Aneka Kacang
			500.6.11.4	Aneka Umbi
	500.6.12			Tanaman Pangan
			500.6.12.1	Pengeloalan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan
			500.6.12.2	Dampak Perubahan Iklim
			500.6.12.3	Teknoogi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
			500.6.12.4	Pengelolaan Pengendalian Hama Tepadu
	500.6.13			Pascapanen Tanaman Pangan
			500.6.13.1	Padi
			500.6.13.2	Jagung dan Serealiala alin
			500.6.13.3	Kedelai dan Aneka Kacang
			500.6.13.4	Aneka Umbi
	500.6.14			Pengolahan Hasil Pertanian
			500.6.14.1	Tanaman Pangan
			500.6.14.2	Holtikurtura
			500.6.14.3	Perkebunan
			500.6.14.4	Peternakan
	500.6.15			Mutu dan Standariasi
			500.6.15.1	Standardisasi
			500.6.15.2	Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu
			500.6.15.3	Akreditasi dan Kelembagaan
			500.6.15.4	Kerjasama dan Harmonisasi
	500.6.16			Pengembangan Usaha dan Investasi
			500.6.16.1	Kemitraan dan Kewirausahaan
			500.6.16.2	Investasi
			500.6.16.3	Promosi Dalam Negeri
			500.6.16.4	Promosi Luar Negeri
	500.6.17			Pemasaran Domestik
			500.6.17.1	Informasi Pasar
			500.6.17.2	Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga
			500.6.17.3	Sarana dan Kelembagaan Pasar
			500.6.17.4	Jaringan Pemasaran
	500.6.18			Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan (antara lain : Rencana Kerja, TOR/ Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat)
	500.6.19			Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan
			500.6.19.1	Hasil Penelitian dan Pengembangan
			500.6.19.2	Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi
	500.6.20			Diseminasi
	500.6.21			Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian
			500.6.21.1	Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop
			500.6.21.2	Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Pubikasi lainnya
	500.6.22			Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan
	500.6.23			Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan
	500.6.24			Data Penelitian dan Pengembangan
	500.6.25			Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan
	500.6.26			Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
			500.6.26.1	Hak Cipta
			500.6.26.2	Hak Paten Sederhana
			500.6.26.3	Hak Paten Biasa
			500.6.26.4	Hak Merek
			500.6.26.5	Pendaftaran Varietas Tanaman
			500.6.26.6	Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan
			500.6.26.7	Permohonan HKI yang ditolak
	500.6.27			Pelayanan Perijinan Pertanian
			500.6.27.1	Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)
			500.6.27.2	Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan)
			500.6.27.3	Sarana III (bidang bibit, karkas,daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak)
	500.6.28			Pelayanan Hukum
			500.6.28.1	Sertifikasi
			500.6.28.2	Pertimbangan Hukum
	500.6.29			Karantina Pertanian
			500.6.29.1	Karantina Tumbuhan
			500.6.29.2	Karantina Hewan
	500.6.30			Bimbingan Teknis
	500.6.31			Evaluasi
500.7				PETERNAKAN
	500.7.1			Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.7.2			Peternakan dan Kesehatan Hewan

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
		500.7.2.1	Perbibitan Ternak (antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak, Pengembangan Bibit Ternak, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran)	
		500.7.2.2	Pakan Ternak	
		500.7.2.3	Budidaya Ternak	
		500.7.2.4	Kesehatan Hewan (antara lain: Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan, Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan)	
		500.7.2.5	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen (antara lain: Pascapanen, Higien Sanitasi, Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan, Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran)	
	500.7.3	Bimbingan Teknis		
	500.7.4	Evaluasi		
500.8	PERKEBUNAN			
	500.8.1	Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	500.8.2	Tanaman Semusim		
		500.8.2.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim	
		500.8.2.2	Perbenihan Tanaman Semusim	
		500.8.2.3	Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusim	
		500.8.2.4	Pemberdayaan Tanaman Semusim	
	500.8.3	Tanaman Rempah & Penyegar		
		500.8.3.1	Identifikasi dan Pendayaguunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar	
		500.8.3.2	Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar	
		500.8.3.3	Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar	
		500.8.3.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar	
	500.8.4	Tanaman Tahunan		
		500.8.4.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan	
		500.8.4.2	Perbenihan Tanaman Tahunan	
		500.8.4.3	Budidaya Tanaman Tahunan	
		500.8.4.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan	
	500.8.5	Perlindungan Perkebunan		
		500.8.5.1	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan	
		500.8.5.2	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar	
		500.8.5.3	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan	
		500.8.5.4	Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran	
	500.8.6	Pascapanen dan Pembinaan Usaha		
		500.8.6.1	Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar	
		500.8.6.2	Pascapanen Tanaman Tahunan	
		500.8.6.3	Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan	
		500.8.6.4	Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik	
	500.8.7	Bimbingan Teknis Perkebunan		
	500.8.8	Evaluasi Perkebunan		
500.9	PERINDUSTRIAN			
	500.9.1	Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	500.9.2	Iklim Usaha dan Kerja Sama		
		500.9.2.1	Industri Manufaktur	
		500.9.2.2	Industri Agro	
		500.9.2.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	
		500.9.2.4	Industri Kecil dan Menengah	
	500.9.3	Promosi Industri		
		500.9.3.1	Industri Manufaktur	
		500.9.3.2	Promosi Industri Agro	
		500.9.3.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	
		500.9.3.4	Industri Kecil dan Menengah	
	500.9.4	Standarisasi dan Teknologi		
		500.9.4.1	Industri Manufaktur	
		500.9.4.2	Industri Agro	
		500.9.4.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	
		500.9.4.4	Industri Kecil dan Menengah	
	500.9.5	Hak atas Kekayaan Intelektual		
		500.9.5.1	Industri Manufaktur	
		500.9.5.2	Industri Agro	
		500.9.5.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	
		500.9.5.4	Industri Kecil dan Menengah	
	500.9.6	Industri Hijau		
		500.9.6.1	Industri Manufaktur	
		500.9.6.2	Industri Agro	
		500.9.6.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	
		500.9.6.4	Industri Kecil dan Menengah	
	500.9.7	Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten		
	500.9.8	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri		
	500.9.9	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri		
	500.9.10	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri		
	500.9.11	Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional		
	500.9.12	Standarisasi		
		500.9.12.1	Standar	
		500.9.12.2	Penyiapan Penerapan	

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
		500.9.12.3	Infrastruktur Standar	
	500.9.13	Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri		
		500.9.13.1	Kebijakan Industri	
		500.9.13.2	Perpajakan dan Tarif	
		500.9.13.3	Pengembangan Model Industrial	
	500.9.14	Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup		
		500.9.14.1	Industri Hijau	
		500.9.14.2	Lingkungan Hidup	
		500.9.14.3	Energi	
	500.9.15	Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual		
		500.9.15.1	Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri	
		500.9.15.2	Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri	
		500.9.15.3	Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual	
	500.9.16	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri		
500.10	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
	500.10.1	Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	500.10.12	Panas Bumi		
		500.10.12.1	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	
		500.10.12.2	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)	
		500.10.12.3	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan	
		500.10.12.4	Rekomendasi Bahan Peledak	
		500.10.12.5	Perizinan penggunaan gudang bahan peledak	
		500.10.12.6	Izin Tangki Bahan Bakar Cair	
		500.10.12.7	Persetujuan sertifikasi Welding Prosedure Specifikation (WPS) dan Prosedure Qualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru Las	
		500.10.12.8	Penerbitasn Izin Usaha Panas Bumi (IUP)	
		500.10.12.9	Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)	
		500.10.12.10	Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL)	
		500.10.12.11	Penetapan kapasitas usaha panas bumi	
		500.10.12.12	Penetapan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	
		500.10.12.13	Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi	
		500.10.12.14	Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi	
		500.10.12.15	Inventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi Obvitnas Bidang Panas Bumi	
		500.10.12.16	Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi	
		500.10.12.17	Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi	
500.11	PERHUBUNGAN			
	500.11.1	Kebijakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	500.11.2	Jaringan Prasarana dan Pelayanan		
		500.11.2.1	Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang	
		500.11.2.2	Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C	
		500.11.2.3	Penetapan lokasi terminal barang utama	
		500.11.2.4	Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal	
		500.11.2.5	Jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi	
		500.11.2.6	Jaringan lintas pada jaringan jalan primer	
		500.11.2.7	Penetapan kelas jalan primer	
		500.11.2.8	Kualifikasi teknis petugas terminal	
		500.11.2.9	Jaringan transportasi jalan sekunder	
	500.11.3	Pengembangan Transportasi Jalan		
		500.11.3.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan	
		500.11.3.2	Pengembangan transportasi jalan	
	500.11.4	Pengujian Kendaraan Bermotor		
		500.11.4.1	Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor	
		500.11.4.2	Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor	
		500.11.4.3	Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor	
		500.11.4.4	Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor	
	500.11.5	Teknologi Kendaraan Bermotor		
		500.11.5.1	Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor	
		500.11.5.2	Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor	
		500.11.5.3	Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor	
		500.11.5.4	Harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor	
	500.11.6	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		
		500.11.6.1	Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan	
		500.11.6.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional	
	500.11.7	Perlengkapan Jalan		
		500.11.7.1	Pedoman teknis perlengkapan jalan	
		500.11.7.2	Penimbangan kendaraan bermotor di jalan	
		500.11.7.3	Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor	
		500.11.7.4	Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor	
		500.11.7.5	Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional	
	500.11.8	Angkutan Penumpang		
		500.11.8.1	Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi	
		500.11.8.2	Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara	
		500.11.8.3	Izin trayek antar kota antar provinsi	
		500.11.8.4	Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara & antar kota/provinsi	

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
			500.11.8.5	Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum
			500.11.8.6	Pemberian subsidi angkutan umum
			500.11.8.7	Angkutan perintis
			500.11.8.8	Penghargaan perusahaan angkutan umum
		500.11.9	Angkutan Barang	
			500.11.9.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
			500.11.9.2	Tarif angkutan barang
			500.11.9.3	Izin operasi angkutan barang tertentu
			500.11.9.4	Pembinaan angkutan barang
			500.11.9.5	Izin dispensasi angkutan jalan
		500.11.10	Monitoring Operasional	
			500.11.10.1	Pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
			500.11.10.2	Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan
			500.11.10.3	Berkas Pelanggaran Perda
		500.11.11	Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil	
			500.11.11.1	Pedoman Teknis
			500.11.11.2	Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
			500.11.11.3	Bimtek PPNS
			500.11.11.4	Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
		500.11.12	Analisa dan Evaluasi Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	
			500.11.12.1	Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan
			500.11.12.2	Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, & penyeberangan
		500.11.13	Pengembangan Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	
			500.11.13.1	Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan)
			500.11.13.2	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
		500.11.14	Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	
		500.11.15	Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	
			500.11.15.1	Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan
			500.11.15.2	Pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau danau dan penyeberangan
		500.11.16	Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
			500.11.16.1	Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
			500.11.16.2	Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan
			500.11.16.3	Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional
			500.11.16.4	Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
		500.11.17	Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	
		500.11.18	Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan	
			500.11.18.1	Manajemen lalu lintas
			500.11.18.2	Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan
			500.11.18.3	Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai & danau
			500.11.18.4	Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau
		500.11.19	Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan	
			500.11.19.1	Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan
			500.11.19.2	Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau
			500.11.19.3	Perambuan sungai, danau dan penyeberangan
		500.11.20	Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
			500.11.20.1	Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
			500.11.20.2	Persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional
		500.11.21	Tarif dan Keperintisan	
			500.11.21.1	Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
			500.11.21.2	Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan
		500.11.22	Bina Sistem Transportasi Perkotaan	
			500.11.22.1	Jaringan Transportasi Perkotaan
			500.11.22.2	Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan
			500.11.22.3	Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi
		500.11.23	Lalu Lintas Perkotaan	
			500.11.23.1	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan
			500.11.23.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
			500.11.23.3	Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah
		500.11.24	Angkutan Perkotaan	
			500.11.24.1	Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek
			500.11.24.2	Jaringan trayek perkotaan
			500.11.24.3	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi
		500.11.25	Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan	
			500.11.25.1	Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang
			500.11.25.2	Pengaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi
			500.11.25.3	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi
		500.11.26	Dampak Transportasi Perkotaan	
			500.11.26.1	Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan
			500.11.26.2	Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan
			500.11.26.3	Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan
			500.11.26.4	Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
		500.11.26.5	Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan	
		500.11.26.6	Masterplan transportasi perkotaan	
	500.11.27	Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan		
		500.11.27.1	Monitoring dan evaluasi data kecelakaan	
		500.11.27.2	Kualifikasi unit pengkajian	
		500.11.27.3	Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan	
	500.11.28	Pengembangan Keselamatan		
		500.11.28.1	Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan	
		500.11.28.2	Harmonisasi kebijakan	
	500.11.29	Promosi dan Kemitraan Keselamatan		
		500.11.29.1	Promosi Keselamatan : penyuluhan, publikasi dan destinasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan	
		500.11.29.2	Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan	
	500.11.30	Bina Keselamatan Angkutan Umum		
		500.11.30.1	Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum	
		500.11.30.2	Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau	
	500.11.31	Audit Keselamatan		
		500.11.31.1	Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia	
		500.11.31.2	Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan	
		500.11.31.3	Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan	
	500.11.32	Inspeksi Keselamatan		
		500.11.32.1	Pedoman keselamatan	
		500.11.32.2	Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan	
		500.11.32.3	Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan	
	500.11.33	Parkir		
		500.11.33.1	Surat Tugas Juru Parkir	
		500.11.33.2	Izin tempat khusus parkir swasta	
		500.11.33.3	Surat Tugas TKP Pemerintah	
500.12	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	500.12.1	Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	500.12.2	Telekomunikasi		
		500.12.2.1	Layanan Jaringan Telekomunikasi	
		500.12.2.2	Layanan Jasa Telekomunikasi	
		500.12.2.3	Penomoran Telekomunikasi dan Informatika	
		500.12.2.4	Kelayakan Sistem Telekomunikasi	
	500.12.3	Penyiaran		
		500.12.3.1	Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi	
		500.12.3.2	Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi	
	500.12.4	Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal		
		500.12.4.1	Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah	
		500.12.4.2	Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah Daerah	
		500.12.4.3	Layanan Khusus Penyiaran	
		500.12.4.4	Pelayanan Kewajiban Universal	
		500.12.4.5	Pengembangan Infrastruktur	
	500.12.5	Pengendalian Informatika		
		500.12.5.1	Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi	
		500.12.5.2	Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi	
		500.12.5.3	Monitoring dan Evaluasi Penyiaran	
		500.12.5.4	Pencegahan dan Penertiban	
	500.12.6	e- Government		
		500.12.6.1	Tata Kelola e-Government	
		500.12.6.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Government	
		500.12.6.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government	
		500.12.6.4	Aplikasi Layanan Kepemerintahan	
		500.12.6.5	Aplikasi Layanan Publik	
	500.12.7	e- Business		
		500.12.7.1	Tata Kelola e-Business	
		500.12.7.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Business	
		500.12.7.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Business	
		500.12.7.4	Aplikasi Layanan e-Business	
	500.12.8	Pemberdayaan Informatika Masyarakat		
		500.12.8.1	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan	
		500.12.8.2	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan	
	500.12.9	Pemberdayaan Industri Informatika		
		500.12.9.1	Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika	
		500.12.9.2	Industri Perangkat Informatika Pengguna	
		500.12.9.3	Industri Perangkat Lunak	
		500.12.9.4	Industri Konten Multimedia	
	500.12.10	Keamanan Informasi		
		500.12.10.1	Tata Kelola Keamanan Informasi	
		500.12.10.2	Teknologi Keamanan Informasi	
		500.12.10.3	Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi	
		500.12.10.4	Penyidikan dan Penindakan	

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
		500.12.10.5	Budaya Keamanan Informasi	
	500.12.11	Komunikasi Publik		
		500.12.11.1	Tata Kelola Komunikasi Publik	
		500.12.11.2	Pengelolaan Opini Publik	
		500.12.11.3	Layanan Komunikasi Publik	
	500.12.12	Pengolahan dan Penyediaan Informasi		
		500.12.12.1	Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan	
		500.12.12.2	Informasi Perekonomian	
		500.12.12.3	Informasi Kesejahteraan Rakyat	
	500.12.13	Pengelolaan Media Publik		
		500.12.13.1	Media Cetak	
		500.12.13.2	Media Online	
		500.12.13.3	Media Luar Ruang dan Audio Visual	
	500.12.14	Kemitraan Komunikasi		
		500.12.14.1	Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara	
		500.12.14.2	Kemitraan Media dan Dunia Usaha	
		500.12.14.3	Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi	
	500.12.15	Infrastruktur Informatika		
		500.12.15.1	Jaringan	
		500.12.15.2	Piranti Teknologi Informatika	
		500.12.15.3	Keamanan Informatika	
	500.12.16	Sistem dan Data		
		500.12.16.1	Portal dan Konten	
		500.12.16.2	Pengumpulan dan Pengolahan Data	
		500.12.16.3	Pengembangan Aplikasi	
	500.12.17	Pusat Kerjasama		
		500.12.17.1	Kerja Sama daerah	
		500.12.17.2	Kerja Sama Bilateral	
	500.12.18	Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat		
		500.12.18.1	Pelayanan Informasi	
		500.12.18.2	Hubungan Masyarakat	
		500.12.18.3	Bimbingan Teknis	
	500.12.19	Evaluasi		
500.13	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
	500.13.1	Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	500.13.2	Pengembangan Destinasi Wisata		
		500.13.2.1	Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata	
		500.13.2.2	Pengembangan Daya Tarik Wisata	
		500.13.2.3	Industri Pariwisata	
		500.13.2.4	Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata	
		500.13.2.5	Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event	
	500.13.3	Pemasaran Pariwisata		
		500.13.3.1	Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata	
		500.13.3.2	Promosi Pariwisata Luar Negeri	
		500.13.3.3	Promosi Pariwisata Dalam Negeri	
		500.13.3.4	Pencitraan Indonesia	
	500.13.4	Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya		
		500.13.4.1	Pengembangan industri Perfilman	
		500.13.4.2	Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik	
		500.13.4.3	Pengembangan Seni Rupa	
	500.13.5	Ekonomi Kreatif Berbasi Media, Desain, dan IPTEK		
		500.13.5.1	Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media	
		500.13.5.2	Desain dan Arsitektur	
		500.13.5.3	Kerjasama dan Fasilitasi	
	500.13.6	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
		500.13.6.1	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan	
		500.13.6.2	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif	
		500.13.6.3	Pengembangan SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	
		500.13.6.4	Kompetensi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	
500.14	STATISTIK			
	500.14.1	Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	500.14.2	Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi		
		500.14.2.1	Perencanaan	
		500.14.2.2	Persiapan (antara lain: Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan konsep dan definisi, Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur), Penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan), Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah, Penyusunan pedoman sosialisasi, Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan), Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern), Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT), Pelaksanaan pelatihan petugas, Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi), Pelatihan petugas pengolahan, Perancangan tabel, Pelaksanaan Ujicoba	
		500.14.2.3	Pelaksanaan Lapangan	
		500.14.2.4	Pengolahan (antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/pengiriman, pengelompokan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi)	
		500.14.2.5	Analisis dan Penyajian Hasil Sensus	

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
		500.14.2.6	Diseminasi hasil sensus	
	500.14.3	Survei		
		500.14.3.1	Perencanaan	
		500.14.3.2	Persiapan	
		500.14.3.3	Pelaksanaan Lapangan (antara lain: Pelaksanaan listing, Pemilihan sampel, Pengumpulan data, Pemeriksaan, Pengawasan Lapangan, Monitoring kualitas)	
		500.14.3.4	Pengolahan (antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokkan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi)	
		500.14.3.5	Analisis dan Penyajian Hasil Survei (antara lain: Pembahasan angka hasil pengolahan, Penyusunan angka sementara, Penyusunan angka tetap, Penyusunan/pembahasan draft publikasi, Analisis data, Penyusunan publikasi)	
		500.14.3.6	Diseminasi hasil Survei	
	500.14.4	Konsolidasi Data Statistik		
		500.14.4.1	Kompilasi Data	
		500.14.4.2	Analisis data	
		500.14.4.3	Penyusunan Publikasi	
	500.14.5	Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik		
500.15	KETENAGAKERJAAN			
	500.15.1	Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	500.15.2	Perencanaan Tenaga Kerja		
		500.15.2.1	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah	
		500.15.2.2	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta	
	500.15.3	Pengembangan Standarisasi Kompetensi		
		500.15.3.1	Penerapan Standar Kompetensi	
		500.15.3.2	Pengembangan Standarisasi Kompetensi	
		500.15.3.3	Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan	
		500.15.3.4	Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan	
		500.15.3.5	Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian	
	500.15.4	Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja		
		500.15.4.1	Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan	
		500.15.4.2	Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan	
		500.15.4.3	Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan	
		500.15.4.4	Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga	
	500.15.5	Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan		
		500.15.5.1	Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah	
		500.15.5.2	Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta	
		500.15.5.3	Tenaga Pelatihan	
		500.15.5.4	Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan	
	500.15.6	Bina Pemagangan		
		500.15.6.1	Pemagangan Dalam Negeri	
		500.15.6.2	Pemagangan Luar Negeri	
		500.15.6.3	Perizinan dan Advokasi Pemagangan	
		500.15.6.4	Promosi dan Jenjang Pemagangan	
	500.15.7	Produktivitas dan Kewirausahaan		
		500.15.7.1	Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan	
		500.15.7.2	Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas	
		500.15.7.3	Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas	
		500.15.7.4	Pengembangan Kewirausahaan	
	500.15.8	Pengembangan Pasar Kerja		
		500.15.8.1	Informasi Pasar Kerja	
		500.15.8.2	Analisis Pasar Kerja	
		500.15.8.3	Bursa Kerja	
		500.15.8.4	Analisis Jabatan	
	500.15.9	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri		
		500.15.9.1	Antar Kerja	
		500.15.9.2	Penempatan Tenaga Kerja Khusus	
		500.15.9.3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	
		500.15.9.4	Pemberdayaan Pengantar Kerja	
	500.15.10	Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal		
		500.15.10.1	Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal	
		500.15.10.2	Pengembangan Padat Karya	
		500.15.10.3	Terapan Teknologi Tepat Guna	
		500.15.10.4	Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga	
	500.15.11	Standardisasi Profesi		
		500.15.11.1	Sistem Informasi dan Registrasi	
		500.15.11.2	Pembakuan Akreditasi	
	500.15.12	Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi		
		500.15.12.1	Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama	
		500.15.12.2	Perjanjian Kerja	
		500.15.12.3	Kesejahteraan Pekerja	
		500.15.12.4	Analisis Diskriminasi Syarat Kerja	
	500.15.13	Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial		
		500.15.13.1	Organisasi Pekerja dan Pengusaha	
		500.15.13.2	Kelembagaan Hubungan Industrial	
		500.15.13.3	Pemasyarakatan Hubungan Industrial	
	500.15.14	Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial		
		500.15.14.1	Pengupahan	

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
			500.15.14.2	Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja
	500.15.15			Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial
		500.15.15.1		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
		500.15.15.2		Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
		500.15.15.3		Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
	500.15.16			Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
		500.15.16.1		Pengawasan Norma Kerja
		500.15.16.2		Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat
		500.15.16.3		Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja
	500.15.17			Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak
		500.15.17.1		Pengawasan Norma Kerja Perempuan
		500.15.17.2		Pengawasan Norma Kerja Anak
		500.15.17.3		Kerjasama Lintas Sektoral
		500.15.17.4		Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak
	500.15.18			Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
		500.15.18.1		Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan
		500.15.18.2		Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran
		500.15.18.3		Pengawasan Norma Kesehatan Kerja
		500.15.18.4		Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
		500.15.18.5		Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3
	500.15.19			Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan
	500.15.20			Bina Penegakan Hukum
		500.15.20.1		Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
		500.15.20.2		Penyidikan Norma Ketenagakerjaan
		500.15.20.3		Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
		500.15.20.4		Kerjasama Penegakan Hukum
	500.15.21			Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
		500.15.21.1		Analisis dan Standardisasi bidang K 3
		500.15.21.2		Hasil kajian, perekayasa dan penerapan teknologi dan alih teknologi K 3
		500.15.21.3		Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K 3
		500.15.21.4		Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3
	500.15.22			Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
		500.15.22.1		Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
		500.15.22.2		Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
		500.15.22.3		Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
		500.15.22.4		Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
		500.15.22.5		Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
		500.15.22.6		Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
500.16	PENANAMAN MODAL			
	500.16.1			Kebijakan di bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.16.2			Perencanaan Penanaman Modal
		500.16.2.1		Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya
		500.16.2.2		Perencanaan Industri Manufaktur
		500.16.2.3		Perencanaan Jasa dan Kawasan
		500.16.2.4		Perencanaan Infrastruktur
	500.16.3			Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		500.16.3.1		Deregulasi Penanaman Modal
		500.16.3.2		Pengembangan Potensi Daerah
		500.16.3.3		Pemberdayaan Usaha
		500.16.3.4		Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan
		500.16.3.5		Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha
		500.16.3.6		Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha
	500.16.4			Promosi Penanaman Modal
		500.16.4.1		Pengembangan Promosi
		500.16.4.2		Analisis Strategi Promosi
		500.16.4.3		Fasilitasi Promosi Luar Negeri
		500.16.4.4		Promosi Sektoral
		500.16.4.5		Fasilitasi Promosi Daerah
		500.16.4.6		Pameran dan Sarana Promosi
	500.16.5			Kerja Sama Penanaman Modal
		500.16.5.1		Kerja Sama Bilateral dan Multilateral
		500.16.5.2		Kerja Sama Regional
		500.16.5.3		Kerja Sama Dunia Usaha Internasional
	500.16.6			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		500.16.6.1		Pemantauan Penanaman Modal
		500.16.6.2		Data Realisasi Penanaman Modal
		500.16.6.3		Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal
		500.16.6.4		Fasilitasi Penyelesaian Masalah
		500.16.6.5		Pengawasan Penanaman Modal
		500.16.6.6		Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal
	500.16.7			Pelayanan Penanaman Modal
		500.16.7.1		Pelayanan Aplikasi
		500.16.7.2		Pelayanan Perijinan
		500.16.7.3		Pelayanan Konsultasi Perijinan
		500.16.7.4		Pelayanan Non Perijinan
		500.16.7.5		Pelayanan Fasilitas

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
500.17				PERTANAHAN
	500.17.1	Kebijakan di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	500.17.2	Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan		
	500.17.2.1	Fasilitasi Pengadaan Tanah		
	500.17.2.2	Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan		
	500.17.2.3	Data dan Informasi Pertanahan		
	500.17.2.4	Advokasi dan Pengendalian		
	500.17.3	Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah		
	500.17.3.1	Penatagunaan Tanah		
	500.17.3.2	Data dan Pemetaan Tematik		
	500.17.3.3	Penguatan Atas Tanah		
	500.17.4	Sengketa Tanah		
	500.17.4.1	Pengkajian dan Penanganan Sengketa		
	500.17.4.2	Advokasi dan Pengendalian		
500.18				TRANSMIGRASI
	500.18.1	Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	500.18.2	Penyediaan Tanah Transmigrasi		
	500.18.2.1	Fasilitasi Pengadaan Tanah		
	500.18.2.2	Pengurusan Legalitas Tanah		
	500.18.2.3	Dokumentasi Pertanahan		
	500.18.2.4	Advokasi Pertanahan		
	500.18.3	Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi		
	500.18.3.1	Penyiapan Lahan		
	500.18.3.2	Penyiapan Sarana		
	500.18.3.3	Penyiapan Prasarana		
	500.18.3.4	Evaluasi Kelayakan Permukiman		
	500.18.4	Fasilitasi Penempatan Transmigrasi		
	500.18.4.1	Penyiapan Calon Transmigrasi		
	500.18.4.2	Penyiapan Perpindahan		
	500.18.4.3	Pelaksanaan Perpindahan		
	500.18.4.4	Penataan dan Adaptasi		
	500.18.5	Partisipasi Masyarakat		
	500.18.5.1	Promosi dan Motivasi		
	500.18.5.2	Kerjasama Kelembagaan		
	500.18.5.3	Kerjasama Antar Daerah		
	500.18.5.4	Pelayanan Investasi		
	500.18.6	Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi		
	500.18.6.1	Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan		
	500.18.6.2	Bina Sistem Informasi		
	500.18.6.3	Perencanaan Pengembangan Kawasan		
	500.18.6.4	Perencanaan Pengembangan Masyarakat		
	500.18.6.5	Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan		
	500.18.7	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat		
	500.18.7.1	Bantuan Pangan dan Kesehatan		
	500.18.7.2	Fasilitas Sosial Budaya		
	500.18.7.3	Pengembangan Kelembagaan		
	500.18.7.4	Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi		
	500.18.8	Pengembangan Usaha		
	500.18.8.1	Kewirausahaan		
	500.18.8.2	Produksi		
	500.18.8.3	Pengolahan Hasil dan Pemasaran		
	500.18.8.4	Lembaga Ekonomi dan permodalan		
	500.18.9	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan		
	500.18.9.1	Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana		
	500.18.9.2	Pengembangan Sarana		
	500.18.9.3	Pengembangan Prasarana		
	500.18.9.4	Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana		
	500.18.10	Penyerasian Lingkungan		
	500.18.10.1	Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan		
	500.18.10.2	Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan		
	500.18.10.3	Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi		
	500.18.10.4	Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan		
600				PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
600.1				PEKERJAAN UMUM
	600.1.1	Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	600.1.2	Penatagunaan Sumber Daya Air		
	600.1.2.1	Perencanaan Wilayah Sungai		
	600.1.2.2	Kelembagaan		
	600.1.2.3	Pemanfaatan Sumber Daya Air		
	600.1.2.4	Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air		
	600.1.2.5	Pengaturan dan Pemantauan		
	600.1.3	Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air		
	600.1.3.1	Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air		

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
			600.1.3.2	Manajemen Mutu
			600.1.3.3	Informasi dan Data Sumber Daya Air
			600.1.3.4	Keterpaduan Pemrograman
	600.1.4		Pengelolaan Sumber Daya Air	
		600.1.4.1	Pengelolaan Sungai dan Pantai	
		600.1.4.2	Pengelolaan Irigasi dan Rawa	
		600.1.4.3	Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung	
		600.1.4.4	Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku	
	600.1.5		Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	
		600.1.5.1	Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai	
		600.1.5.2	Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa	
		600.1.5.3	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung	
		600.1.5.4	Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku	
	600.1.7		Pengembangan Jaringan Jalan	
		600.1.7.1	Keterpaduan Perencanaan	
		600.1.7.2	Sistem Jaringan Jalan	
		600.1.7.3	Lingkungan dan Keselamatan Jalan	
	600.1.8		Pembangunan Jalan	
		600.1.8.1	Standar dan Pedoman	
		600.1.8.2	Manajemen Konstruksi	
		600.1.8.3	Pengelolaan Gedometrik, Perkerasan, dan Drainage	
		600.1.8.4	Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng	
	600.1.9		Preservasi Jalan	
		600.1.9.1	Standar dan Pedoman	
		600.1.9.2	Perencanaan Teknis	
		600.1.9.3	Teknik Rekonstruksi	
		600.1.9.4	Teknik Pemeliharaan Jalan	
	600.1.10		Pengelolaan Jembatan	
		600.1.10.1	Standar dan Pedoman	
		600.1.10.2	Perencanaan Teknis	
		600.1.10.3	Teknik Jembatan	
		600.1.10.4	Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus	
	600.1.13		Keterpaduan Infrastruktur Permukiman	
		600.1.13.1	Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan	
		600.1.13.2	Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan	
	600.1.14		Pengembangan Kawasan Permukiman	
		600.1.14.1	Perencanaan Teknis	
		600.1.14.2	Kawasan Permukiman Perkotaan	
		600.1.14.3	Kawasan Permukiman Pedesaan	
		600.1.14.4	Kawasan Permukiman Khusus	
		600.1.14.5	Kelembagaan	
	600.1.15		Pembinaan Penataan Bangunan	
		600.1.15.1	Perencanaan Teknis	
		600.1.15.2	Penataan Bangunan Gedung	
		600.1.15.3	Pengelolaan Rumah Negara	
		600.1.15.4	Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus	
		600.1.15.5	Kelembagaan	
	600.1.16		Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
		600.1.16.1	Perencanaan Teknis	
		600.1.16.2	Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan	
		600.1.16.3	Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan	
		600.1.16.4	Sistem Penyediaan Air Minum Khusus	
		600.1.16.5	Kelembagaan	
		600.1.16.6	Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	
		600.1.16.7	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja	
	600.1.17		Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman	
		600.1.17.1	Perencanaan Teknis	
		600.1.17.2	Pengelolaan Air Limbah	
		600.1.17.3	Pengelolaan Persampahan	
		600.1.17.4	Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus	
		600.1.17.5	Kelembagaan	
		600.1.17.6	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja	
	600.1.18		Pemantauan dan Evaluasi	
600.2			PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	600.2.1		Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	600.2.2		Perencanaan Pembiayaan Perumahan	
		600.2.2.1	Keterpaduan Perencanaan	
		600.2.2.2	Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan	
		600.2.2.3	Kemitraan	
	600.2.3		Pola Pembiayaan Perumahan	
		600.2.3.1	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum	
		600.2.3.2	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan	
		600.2.3.3	Pola Investasi Perumahan	
	600.2.4		Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan	
		600.2.4.1	Sumber Pembiayaan Primer	
		600.2.4.2	Sumber Pembiayaan Sekunder	
		600.2.4.3	Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya	
		600.2.4.4	Sistem Pembiayaan Perumahan	

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
		600.2.4.5	Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	
	600.2.5	Perencanaan	Penyediaan Perumahan	
		600.2.5.1	Keterpaduan Perencanaan	
		600.2.5.2	Analisa Teknik	
		600.2.5.3	Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian	
		600.2.5.4	Kemitraan dan Kelembagaan	
	600.2.6	Penyediaan Rumah Susun		
		600.2.6.1	Perencanaan Teknik	
		600.2.6.2	Penyediaan	
		600.2.6.3	Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan	
		600.2.6.4	Pengelolaan	
	600.2.7	Penyediaan Rumah Khusus		
		600.2.7.1	Perencanaan Teknik	
		600.2.7.2	Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus	
		600.2.7.3	Bimbingan teknis dan supervisi	
		600.2.7.4	Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya	
		600.2.7.5	Perencanaan Teknik	
		600.2.7.6	Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni	
		600.2.7.7	Pelaksanaan Bantuan Simultan	
	600.2.8	Penyediaan Rumah Umum dan Komersial		
		600.2.8.1	Perencanaan Teknik	
		600.2.8.2	Pemberian Bantuan Rumah Umum	
		600.2.8.3	Fasilitasi Hunian Berimbang	
		600.2.8.4	Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan	
	600.2.9	Investasi Infrastruktur		
		600.2.9.1	Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur	
		600.2.9.2	Sinkronisasi Investasi Infrastruktur	
		600.2.9.3	Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur	
		600.2.9.4	Pasar Infrastruktur	
	600.2.10	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi		
		600.2.10.1	Sistem Penyelenggaraan	
		600.2.10.2	Kontrak Konstruksi	
		600.2.10.3	Konstruksi Berkelanjutan	
		600.2.10.4	Manajemen Mutu	
	600.2.11	Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi		
		600.2.11.1	Kelembagaan	
		600.2.11.2	Material dan Peralatan Konstruksi	
		600.2.11.3	Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri	
		600.2.11.4	Usaha Jasa Konstruksi	
	600.2.12	Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi		
		600.2.12.1	Standar dan Materi Kompetensi	
		600.2.12.2	Penerapan Kompetensi	
		600.2.12.3	Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi	
		600.2.12.4	Pengembangan Produktivitas	
	600.2.13	Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi		
		600.2.13.1	Peningkatan Kerjasama	
		600.2.13.2	Pemberdayaan Jasa Konstruksi	
	600.2.14	Peningkatan Jasa Konstruksi		
		600.2.14.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja	
		600.2.14.2	Pelaksanaan Pengendalian Mutu	
	600.2.15	Penerapan Teknologi Konstruksi		
		600.2.15.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerjasama Penerapan Teknologi Konstruksi	
		600.2.15.2	Pengembangan Materi	
		600.2.15.3	Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi	
	600.2.16	Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR)		
		600.2.16.1	Antar Sektor	
		600.2.16.2	Antar Wilayah	
	600.2.17	Pengembangan Kawasan Strategis		
		600.2.17.1	Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis	
		600.2.17.2	Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis	
	600.2.18	Pengembangan Kawasan Perkotaan		
		600.2.18.1	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan	
		600.2.18.2	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru	
		600.2.18.3	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan	
		600.2.18.4	Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan	
		600.2.18.5	Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat (PUPR)	
	600.2.19	Pemantauan dan Evaluasi		
600.3	TATA RUANG (TATA KOTA)			
	600.3.1	Kebijakan di bidang Tata Ruang yang dilakukan Pemerintahan Daerah		
	600.3.2	Perencanaan		
		600.3.2.1	Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW)	
		600.3.2.2	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	
		600.3.2.3	Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten	
		600.3.2.4	Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)	
		600.3.2.5	Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten	
		600.3.2.6	Rencana Teknis Prasarana Kota	
		600.3.2.7	Rencana Tekni Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kotas Prasarana Kota	

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
	600.3.3	Pemanfaatan dan Pengendalian		
		600.3.3.1	Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang	
		600.3.3.2	Ijin Pemanfaatan Ruang	
		600.3.3.3	Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang	
	600.3.4	Pemetaan		
		600.3.4.1	Peta Dasar	
		600.3.4.2	Survey Pemetaan Ruang Darat	
		600.3.4.3	Survey Pemetaan Ruang Air	
		600.3.4.4	Survey Pemetaan Ruang Udara	
600.4	LINGKUNGAN HIDUP			
	600.4.1	Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	600.4.2	Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		
		600.4.2.1	Inventarisasi, Penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan	
		600.4.2.2	Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam	
	600.4.3	Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor		
		600.4.3.1	Evaluasi Penerapan	
		600.4.3.2	Perencanaan Lingkungan Hidup	
	600.4.4	Ekonomi Lingkungan		
	600.4.5	Dampak Lingkungan		
		600.4.5.1	Bimtek Dampak Lingkungan	
		600.4.5.2	Penerapan sistem kebijakan Dampak lingkungan	
		600.4.5.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut	
	600.4.6	Pemantauan dan Pengawasan		
		600.4.6.1	Manufaktur Prasarana dan Jasa	
		600.4.6.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas	
		600.4.6.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil	
		600.4.6.4	Udara Sumber Bergerak	
	600.4.7	Evaluasi dan Pengembangan		
		600.4.7.1	Manufaktur, Prasarana dan Jasa	
		600.4.7.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas	
		600.4.7.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil	
		600.4.7.4	Udara Sumber Bergerak	
	600.4.8	Keanekaragaman Hayati dan pengendalian Kerusakan Lahan		
		600.4.8.1	Pengembangan	
		600.4.8.2	Pemanfaatan	
		600.4.8.3	Pengelolaan Sumber Daya Genetik	
		600.4.8.4	Keamanan Hayati	
		600.4.8.5	Pengendalian kerusakan Lahan	
	600.4.9	Kerusakan Ekosistem Perairan Darat		
		600.4.9.1	Kerusakan Ekosistem	
		600.4.9.2	Rawa	
	600.4.10	Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer		
		600.4.10.1	Perangkat mitigasi	
		600.4.10.2	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca	
		600.4.10.3	Pengendalian Bahan Perusak Ozon	
		600.4.10.4	Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan	
	600.4.11	Adaptasi Perubahan Iklim		
		600.4.11.1	Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim (antara lain: Pengembangan perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim)	
		600.4.11.2	Kerentanan Perubahan Iklim	
	600.4.12	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun		
		600.4.12.1	Registrasi dan Notifikasi	
		600.4.12.2	Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun	
		600.4.12.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut	
	600.4.13	Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun		
		600.4.13.1	Pengumpulan dan pemanfaatan	
		600.4.13.2	Pengangkutan dan Pengolahan	
		600.4.13.3	Penimbunan dan Dumping	
		600.4.13.4	Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas	
	600.4.14	Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3		
		600.4.14.1	Pemantauan	
		600.4.14.2	Tanggap darurat dan pemelihan Kontaminasi	
	600.4.15	Pengelolaan Sampah		
		600.4.15.1	Pembatasan sampah	
		600.4.15.2	Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah	
		600.4.15.3	Pembentukan Dewan Adipura	
		600.4.15.4	Penetapan pemenang adipura	
	600.4.16	Hukum Administrasi Lingkungan		
		600.4.16.1	Pengelolaan dan pengembangan pengaduan	
		600.4.16.2	Penataan hukum administrasi lingkungan	
	600.4.17	Penyelesaian Sengketa Lingkungan		
		600.4.17.1	Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan	
		600.4.17.2	Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan	
	600.4.18	Penegakan hukum pidana lingkungan		
		600.4.18.1	Penyidikan	
		600.4.18.2	Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut	
		600.4.18.3	Koordinasi pembinaan penyidik PNS	

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
	600.4.19	Komunikasi Lingkungan		
	600.4.19.1	Pengembangan Komunikasi		
	600.4.19.2	Publikasi dan Kampanye		
	600.4.20	Penguatan Inisiatif Masyarakat		
	600.4.20.1	Komunitas Pendidikan Lingkungan		
	600.4.20.2	Kearifan Lingkungan		
	600.4.21	Peningkatan Peran Masyarakat		
	600.4.21.1	Masyarakat Perkotaan		
	600.4.21.2	Masyarakat Pedesaan		
	600.4.22	Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan		
	600.4.22.1	Organisasi Sosial Masyarakat		
	600.4.22.2	Organisasi Profesi Dunia Usaha		
	600.4.23	Data dan Informasi Lingkungan		
	600.4.23.1	Pengelolaan Data		
	600.4.23.2	Pengelolaan Informasi		
	600.4.23.3	Pengembangan Perangkat Lunak		
	600.4.23.4	Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan		
	600.4.24	Kelembagaan Lingkungan		
	600.4.24.1	Kelembagaan dan Tata Laksana		
	600.4.24.2	Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal		
	600.4.25	Standarisasi dan teknologi		
	600.4.25.1	Standarisasi Manajemen dan dan Pengujian Lingkungan		
	600.4.25.2	Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan		
	600.4.25.3	Teknologi Ramah Lingkungan		
	600.4.26	Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan		
	600.4.26.1	Pemantauan dan Kajian Kualitas Llingkungan		
	600.4.26.2	Laboratorium Rujukan dan Pengujian		
700 PENGAWASAN				
	700.1	PENGAWASAN INTERNAL		
	700.1.1	Rencana Pengawasan		
	700.1.1.1	Rencana Strategis Pengawasan		
	700.1.1.2	Rencana Kerja Pengawas Tahunan		
	700.1.1.3	Rencana Kinerja Tahunan		
	700.1.1.4	Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan		
	700.1.1.5	Rakor Pengawasan Tingkat Daerah		
	700.1.2	Pelaksanaan Pengawasan		
	700.1.2.1	Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL)		
	700.1.2.2	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut		
	700.1.2.3	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut		
	700.1.2.4	Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat		
	700.1.2.5	Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan		
	700.1.2.6	Laporan Perkembangan Barang Milik Negara		
	700.1.2.7	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi		
	700.1.2.8	Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review		
	700.1.2.9	Good Corporate Governance (GCG)		
800 KEPEGAWAIAN				
	800.1	SUMBER DAYA MANUSIA		
	800.1.1	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara		
	800.1.1.1	Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (antara lain: Bahan penyusunan rencana kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan Data Kebutuhan)		
	800.1.1.2	Perencanaan Pertimbangan Formasi (antara lain: Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN, Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas)		
	800.1.1.3	Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara		
	800.1.1.4	Standarisasi Jabatan (antara lain: Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan)		
	800.1.2	Formasi dan Pengadaan Pegawai		
	800.1.2.1	Formasi ASN (antara lain: Usulan formasi, Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN , Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus)		
	800.1.2.2	Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN (antara lain: Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN)		
	800.1.2.3	Pengumuman Kelulusan ASN		
	800.1.2.4	Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima		
	800.1.2.5	Pangkat ASN		
	800.1.2.6	Open Biding (Seleksi Terbuka Jabatan)		
	800.1.2.7	Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN		
	800.1.2.8	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN		
	800.1.3	Mutasi Pegawai		
	800.1.3.1	Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN		
	800.1.3.2	Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan		
	800.1.3.3	Pangkat dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional		

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
			800.1.3.4	Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai
			800.1.3.5	Peninjauan Masa Kerja
			800.1.3.6	Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)
	800.1.4		Pengembangan Karir	
		800.1.4.1	Usulan Tugas Belajar/ Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/ Magang/ Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi lain/ Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta	
		800.1.4.2	Penyesuaian ijazah	
		800.1.4.3	Penyusunan Sistem Karier	
		800.1.4.4	Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja	
		800.1.4.5	Angka Kredit (antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit)	
	800.1.5		Kinerja Aparatur Sipil Negara	
		800.1.5.1	Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja	
		800.1.5.2	Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja	
		800.1.5.3	Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja	
	800.1.6		Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN	
		800.1.6.1	Kode Etik Pegawai	
		800.1.6.2	Disiplin	
		800.1.6.3	Pemberhentian Dengan Hormat	
		800.1.6.4	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat	
		800.1.6.5	Pemberhentian Sementara	
		800.1.6.6	Pensiun ASN (antara lain: Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN, Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Jada/Dudanya)	
	800.1.7		Bantuan Hukum	
	800.1.8		Status dan Kedudukan Pegawai	
		800.1.8.1	Status Kepegawaian	
		800.1.8.2	Kedudukan Kepegawaian	
		800.1.8.3	Keberatan Pegawai	
		800.1.8.4	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian	
	800.1.9		Sistem Informasi Kepegawaian	
		800.1.9.1	Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian	
		800.1.9.2	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	
		800.1.9.3	Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik	
		800.1.9.4	Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik	
	800.1.10		Pengawasan dan pengendalian	
		800.1.10.1	Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat	
		800.1.10.2	Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan	
		800.1.10.3	Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja	
		800.1.10.4	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN	
		800.1.10.5	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian	
		800.1.10.6	Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer	
	800.1.11		Administrasi Pegawai	
		800.1.11.1	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas	
		800.1.11.2	Cuti Sakit	
		800.1.11.3	Cuti Bersalin	
		800.1.11.4	Cuti Tahunan	
		800.1.11.5	Cuti Alasan Penting	
		800.1.11.6	Cuti Besar	
		800.1.11.7	Cuti Di luar Tanggungan Negara	
		800.1.11.8	Karpeg/KPE/Karis/Karsu	
		800.1.11.9	Keanggotaan Organisasi Profesi/ Kedinasan	
		800.1.11.10	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)	
		800.1.11.11	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)	
		800.1.11.12	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	
		800.1.11.13	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/ tunjangan	
	800.1.12		Kesejahteraan Pegawai	
		800.1.12.1	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai	
		800.1.12.2	Asuransi Pegawai/BPJS	
		800.1.12.3	Tabungan Perumahan	
		800.1.12.4	Bantuan Sosial	
		800.1.12.5	Pakaian Dinas	
		800.1.12.6	Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas	
		800.1.12.7	Pemberian Tali Kasih	
		800.1.12.8	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa	
		800.1.12.9	Olahraga dan Rekreasi	
		800.1.12.10	Rekam Medis	
	800.1.13		Administrasi Perseorangan	
		800.1.13.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	
		800.1.13.2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	
		800.1.13.3	Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan	
		800.1.13.4	Sekretaris Daerah	
		800.1.13.5	ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional	
	800.1.14		Penilaian Kompetensi	
		800.1.14.1	Penilaian Kompetensi	
		800.1.14.2	Hasil Penilaian Kompetensi	
	800.2		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	800.2.1		Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah	

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
	800.2.2	Pendidikan dan Pelatihan		
		800.2.2.1	Sistem Informasi program dan pembinaan diklat	
		800.2.2.2	Pedoman-pedoman kediklatan	
		800.2.2.3	Kurikulum-kurikulum diklat	
		800.2.2.4	Modul-modul diklat	
		800.2.2.5	Panduan fasilitator	
		800.2.2.6	Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat	
		800.2.2.7	Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat	
		800.2.2.8	Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat	
		800.2.2.9	Konsultasi, advokasi, asistensi diklat	
	800.2.3	Widyaiswara		
		800.2.3.1	Seleksi dan pengembangan Widyaiswara	
		800.2.3.2	Sertifikasi Widyaiswara	
		800.2.3.3	Monitoring dan evaluasi Widyaiswara	
		800.2.3.4	Penilaian Widyaiswara	
		800.2.3.5	Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara	
		800.2.3.6	Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara	
	800.2.4	Penyelenggaraan Diklat		
		800.2.4.1	Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan Penyelenggaraan Diklat	
		800.2.4.2	Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat	
		800.2.4.3	Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat	
		800.2.4.4	Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran	
		800.2.4.5	Sistem informasi diklat	
		800.2.4.6	Monitoring Penyelenggara Diklat	
		800.2.4.7	Monitoring dan evaluasi Pasca diklat	
	800.2.5	Alumni		
900 KEUANGAN				
	900.1	KEUANGAN DAERAH		
		900.1.1	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan(APBD-P)	
			900.1.1.1	Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)
			900.1.1.2	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD)
			900.1.1.3	Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
			900.1.1.4	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)
		900.1.2	Penyusunan Anggaran	
			900.1.2.1	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan
			900.1.2.2	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota
			900.1.2.3	Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah
			900.1.2.4	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
		900.1.3	Pelaksanaan Anggaran	
			900.1.3.1	Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS
			900.1.3.2	Pendapatan
			900.1.3.3	Belanja
			900.1.3.4	Pembiayaan Daerah
			900.1.3.5	Dokumen Penatausahaan Keuangan
			900.1.3.6	Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
			900.1.3.7	Daftar Gaji
			900.1.3.8	Kartu Gaji
			900.1.3.9	Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)
			900.1.3.10	Laporan Keuangan
		900.1.4	Pinjaman/Hibah Luar Negeri	
			900.1.4.1	Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book)
			900.1.4.2	Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book)
			900.1.4.3	Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya
			900.1.4.4	Dokumen Loan Agreemeent (PHLN) antara lain: Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Lender
			900.1.4.5	Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri antara lain: usulan luncuran dana
			900.1.4.6	Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya
			900.1.4.7	Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice)
			900.1.4.8	Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, a.l. : SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya.
			900.1.4.9	Replenishment Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) antara lain : No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA)
			900.1.4.10	Staff Appraisal Report
			900.1.4.11	Report /Laporan
			900.1.4.12	Laporan Hutang Daerah
			900.1.4.13	Completion Report/Annual Report
			900.1.4.14	Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri
		900.1.5	Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)	
		900.1.6	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	
			900.1.6.1	Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
			900.1.6.2	Dokumen Kebijakan Akuntansi
			900.1.6.3	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi
			900.1.6.4	Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/Semesteran
		900.1.7	Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan	
			900.1.7.1	Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
		900.1.7.2	Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya : SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l. : Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan	
		900.1.7.3	Buku Rekening Bank	
		900.1.7.4	Keputusan Pembukuan Rekening	
		900.1.7.5	Pembukuan anggaran terdiri :(antara lain: Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran)	
	900.1.8	Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan		
		900.1.8.1	Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya	
		900.1.8.2	Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan	
	900.1.9	Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu Dari APBD antara lain: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD		
	900.1.10	Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu		
		900.1.10.1	Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu	
		900.1.10.2	Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu	
		900.1.10.3	Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank	
		900.1.10.4	Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya	
	900.1.11	Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah		
		900.1.11.1	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan	
		900.1.11.2	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal	
		900.1.11.3	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional	
		900.1.11.4	Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah	
	900.1.12	Anggaran Daerah		
		900.1.12.1	Anggaran Daerah	
		900.1.12.2	Dukungan Teknis Anggaran Daerah	
	900.1.13	Pendapatan dan Investasi Daerah		
		900.1.13.1	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain: Fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah	
		900.1.13.2	Badan Usaha Milik Daerah antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan, Fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah	
		900.1.13.3	Badan Layanan Umum Daerah antara lain: Analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan keuangan badan layanan umum daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah	
		900.1.13.4	Pengelolaan Kekayaan Daerah antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan , Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah	
		900.1.13.5	Pinjam Dan Obligasi Daerah antara lain: Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah, Fasilitas pelaksanaan kebijakan obligasi daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN, Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah	
	900.1.14	Fasilitasi Dana Perimbangan		
		900.1.14.1	Fasilitasi Dana Alokasi Umum antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum	
		900.1.14.2	Fasilitasi Dana Alokasi Khusus antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar. Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus, Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus	
		900.1.14.3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam	
		900.1.14.4	Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya antara lain: Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus, Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya	
		900.1.14.5	Dukungan Teknis Fasilitas Dana Perimbangan antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan	
	900.1.15	Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah		

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
900.1.15.1				Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)
900.1.15.2				Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)
900.1.15.3				Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)
900.1.15.4				Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli (antara lain: penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)
900.1.15.5				Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain: penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah)

BUPATI POLEWALI MANDAR,



ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 29 September 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Kepala Bagian Hukum



Surahman Akbar, SSTP., M.Adm.KP

Pangkat : Pembina

NIP : 19831017 200212 1 001